

900  
RUS  
K

# Kehidupan pada Masa Pra-Indonesia Zaman Pergerakan

|   |                                   |    |    |
|---|-----------------------------------|----|----|
|  | PERPUSTAKAAN<br>MAN 1 OKU SELATAN |    |    |
| NO.   | 13317                             |    |    |
| TGL.  | 19-9-2022                         |    |    |
| KELAS   | 900                               |    |    |
| ASAL  | PR                                | RT | HC |



Ruswandi Hermawan  
Sukanda Permana

# Kehidupan pada Masa Pra-Indonesia: Zaman Pergerakan

ISBN 978-979-037-032-6

SPI 13-14-32-03-006

## Penulis

Ruswandi Herwandi  
Sukanda Permana

## Penyunting

Ridaswati  
Yogie Nugraha Aryasetia

## Desain Isi

Meida Martina  
Yoan Yohanes

## Desain Sampul

Resa Bilqis  
Dede Irawan

Edisi I: 2008

Edisi II: 2009

Diterbitkan oleh:

PT Setia Purna Inves

Jln. Pasirwangi No.2 Pasirluyu, Soekarno Hatta, Bandung  
40254

*Hak cipta yang dilindungi undang-undang ada pada pengarang.  
Dilarang keras mengutip, menjiplak, dan memfotokopi sebagian atau seluruh  
isi buku ini serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari  
PT Setia Purna Inves*

# Kata Pengantar

**K**ondisi masyarakat Indonesia sebelum abad ke-19, mengalami tekanan yang begitu berat dari para penjajah. Kolonialisme telah mengeruk kekayaan alam dan menindas rakyat Indonesia tanpa mau memperhatikan nasib rakyat. Keadaan ini semakin diperparah dengan belum terbentuknya rasa persatuan dan kesatuan di antara wilayah di Indonesia. Perjuangan rakyat pun masih dilakukan secara lokal dan bersifat kedaerahan.

Hal inilah yang mengakibatkan penjajahan Barat sangat lama berkuasa di wilayah Nusantara.

Namun, sejak akhir abad ke-19, mulai tumbuh rasa nasionalisme di antara para pelajar dan pejuang yang diawali dengan berdirinya Budi Utomo. Organisasi-organisasi pemuda mulai bermunculan di setiap wilayah provinsi di Indonesia. Ideologi kebangsaan mulai tertanam hampir di setiap organisasi kepemudaan. Sejak itulah, gema nasionalisme dan pekik kemerdekaan sering muncul dalam perjuangan merebut kemerdekaan, khususnya ketika zaman pergerakan.

Berkaitan dengan rasa nasionalisme ini, kami sebagai penerbit merasa perlu untuk tetap menumbuhkembangkan rasa nasionalisme, khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa Indonesia. Inilah yang mendasari pembuatan buku *Kehidupan pada Masa Pra-Indonesia: Zaman Pergerakan ini*.

Kami menyadari bahwa terciptanya buku ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak, terutama dari para akademisi, para jurnalis, dan para praktisi yang pada kesempatan ini ada beberapa hasil karyanya yang dijadikan acuan dan sumber dalam pembuatan buku ini.

Untuk itu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan tulisan ini dapat menggugah dan menumbuhkan semangat nasionalisme dan semangat mempertahankan kemerdekaan. Amin.

091.1/0207.2/KPAD/16

2 - 8 - 2016

Penerbit

900 RUS K

# Prakata

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., karena berkat karunia-Nya buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini berjudul *"Kehidupan pada Masa Pra-Indonesia: Zaman Pergerakan* yang mengulas tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa awal kebangkitan nasional Indonesia pada awal abad 19 sampai penjajahan Jepang di Indonesia.

Perjuangan yang dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia terhadap penjajah hampir di seluruh wilayah Nusantara, terutama perlawanan dilakukan di daerah-daerah yang menjadi pusat penjajahan. Semua perlawanan tersebut dilakukan untuk menentang para penjajah dengan menggunakan kekerasan atau senjata. Namun, sejak 1908, perjuangan bangsa Indonesia terhadap bangsa asing yang datang untuk menjajah Indonesia dilawan dengan menggunakan organisasi dan melalui para pemimpin pergerakan perjuangan yang berasal dari kaum cerdik cendikia serta perjuangan yang dilakukan pada saat ini tidak berbentuk kedaerahan tetapi berasal dari rasa persatuan dan kesatuan.

Sejak menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, penjajah Belanda kurang memperhatikan kesejahteraan golongan pribumi (orang-orang Indonesia). Mereka terus mengeruk kekayaan alam dan menindas rakyat Indonesia tanpa mau memperhatikan nasib rakyat itu sendiri. Pada akhir abad ke-19, C.Th.van Deventer mengkritik keadaan itu melalui salah satu karangannya yang berjudul *"Utang Budi.C.Th van Deventer"*, antara lain menyatakan bahwa kemakmuran Belanda diperoleh berkat kerja dan jasa orang Indonesia. Oleh sebab itu, bangsa Belanda sebagai bangsa yang maju dan bermoral harus membayar utang budi kepada bangsa Indonesia. Caranya adalah dengan menjalankan Politik Balas Budi atau dikenal dengan sebutan *Politik Etis*. Politik Etis yang diusulkan oleh C.Th van Deventer berisi tentang perbaikan-perbaikan dalam

bidang irigasi (pengairan), transmigrasi (perpindahan), dan edukasi (pendidikan). Akan tetapi, pelaksanaannya tidak terlepas dari kepentingan pemerintah Hindia Belanda.

Program edukasi itu sendiri sebenarnya merupakan pelaksanaan dari *Politik Asosiasi* yang berarti penggantian kebudayaan asli tanah jajahan dengan kebudayaan penjajah. Walaupun menyimpang dari tujuan semula, beberapa pelaksanaan dari *Politik Etis* telah membawa pengaruh yang baik. Misalnya, dengan didirikannya sekolah-sekolah untuk golongan pribumi. Tujuannya adalah untuk memperoleh tenaga baru pegawai rendah yang bersedia digaji lebih murah daripada tenaga bangsa-bangsa Belanda.

Akibatnya, muncul kaum cerdik pandai yang memelopori dan memimpin pergerakan nasional pada awal abad ke-20. Organisasi modern pertama bagi pribumi, yaitu *Sarekat Prijaji* (1905) kemudian *Boedi Oetomo* (1908)—yang dalam sejarah resmi dianggap sebagai organisasi modern pertama yang juga didirikan oleh para pemuda yang sedang bersekolah di Stovia dipelopori oleh Soetomo. *Boedi Oetomo* dapat bertahan hidup sampai 1920.

Apabila diamati, organisasi-organisasi yang dipelopori oleh para pemuda condong kepada ideologi kebangsaan. Kerangka organisasi yang dibuat oleh gerakan pemuda ketika itu tidak semata-mata hanya melibatkan para cerdik cendikia, tetapi berusaha melibatkan massa rakyat secara luas untuk kepentingan kemerdekaan, bahkan sudah sampai pada pendirian partai politik. Dalam kerangka gerakan, konsep yang dibangun oleh mahasiswa-mahasiswa ketika itu untuk membangun format gerakan adalah tepat, bahwa tulang punggung dari gerakan adalah massa rakyat yang terlibat aktif dalam organisasi modern. Sikap sektarian, dalam artian hanya melibatkan cerdik cendekia dalam gerakan pembebasan nasional tidak terjadi, tetapi yang tumbuh adalah sikap kebangsaan untuk mencapai *Indonesia Merdeka*.

Buku ini merupakan sebuah buku sederhana. Namun, dengan hadirnya buku ini, penulis berharap kita semua menjadi lebih sadar lagi arti sejarah nenek moyang kita terutama kehidupan di masa pra-Indonesia: zaman pergerakan. Akhir kata, tiada gading yang tak retak. Koreksi, saran, dan masukan kami tunggu. Selamat membaca.

**Penulis**

# Daftar Isi

Kata Pengantar - iii

Prakata - iv

## **Bab I Perjuangan**

### **Melawan Bangsa Asing - 1**

#### **A. Perjuangan Melawan Penjajahan Portugis - 1**

#### **B. Perjuangan Melawan Penjajahan Belanda - 4**

1. Perlawanan di Banten - 4
2. Perlawanan di Maluku - 4
3. Perlawanan di Mataram - 6
4. Perlawanan Trunojoyo - 6
5. Perlawanan di Gowa - 8
6. Perlawanan Untung Surapati - 9

#### **C. Timbulnya Perlawanan terhadap Bangsa Belanda - 15**

1. Perlawanan Rakyat Maluku (1817) - 16
2. Perlawanan Kaum Padri (1821-1837) - 16
3. Perlawanan Pangeran Diponegoro (1825-1830) - 17
4. Perlawanan Rakyat Sulawesi - 19
5. Perlawanan di Kalimantan - 20
6. Perlawanan di Bali - 22
7. Perlawanan Rakyat Aceh (1873-1904) - 23
8. Perlawanan Rakyat di Tanah Batak - 25

**Bab II Pergerakan Nasional - 27****A. Organisasi Pergerakan - 27**

1. Budi Utomo - 27
2. Serikat Islam (SI) - 29
3. Indische Partij (IP) - 31
4. Gerakan Pemuda - 34
5. Partai Nasional Indonesia (PNI) - 38
6. Fraksi Nasional - 40
7. Petisi Soetardjo - 41
8. Gabungan Politik Indonesia (GAPI) - 46

**B. Pengaruh Pendidikan Barat terhadap Pergerakan Nasional - 47****C. Sumpah Pemuda - 52****D. Pergerakan Kaum Wanita - 55****Bab III Masa Pendudukan Jepang (1942-1945) - 59**

Daftar Pustaka - 82

Glosarium - 84

Indeks - 86

Lampiran - 88

## Bab I

# Perjuangan Melawan Bangsa Asing

---

*Sejak bangsa asing pertama kali menginjakkan kakinya di Nusantara dan melakukan penindasan terhadap bangsa Indonesia, banyak terjadi perlawanan yang dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia, terutama di daerah-daerah yang menjadi pusat penjajahan. Untuk itu, berikut ini diuraikan mengenai perlawanan bangsa Indonesia di setiap daerah yang menjadi pusat penjajahan.*

---

### A. Perjuangan Melawan Penjajahan Portugis

Portugis merupakan negara yang pertama kali datang ke Nusantara, yaitu sekitar tahun 1511. *Admiral Alfonso D'Albuquerque* memimpin Portugis dan menaklukkan daerah Malaka, yang pada saat itu merupakan bagian dari wilayah Nusantara. Setelah Malaka dikuasai oleh bangsa Portugis, maka mulailah berdatangan bangsa asing ke Nusantara yang memang telah terkenal akan kekayaan rempah-rempahnya, seperti cengkeh, pala, lada, dan sebagainya. Rempah-rempah ini merupakan barang dagangan yang sangat laku di pasaran Benua Eropa.

Setelah Portugis menduduki Malaka, maka mulailah Portugis menguasai Nusantara, yaitu satu per satu kerajaan-kerajaan yang telah ada di Nusantara mulai dikuasainya yang

pada akhirnya Portugis sampai di daerah Ternate dan Tidore. Awal mulanya bangsa Portugis melakukan perdagangan, tetapi karena wilayah Nusantara kaya akan rempah-rempahnya mereka akhirnya ingin menguasai wilayah Nusantara.

Pada ahirnya, terjadilah perlawanan dari berbagai kerajaan di Nusantara. Pada 1511 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Syah I, rakyat Malaka melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis dan akhirnya Malaka jatuh ke tangan Portugis. Sultan Mahmud Syah I kemudian lari ke Kampar hingga wafat pada 1528.

Perlawanan terhadap bangsa Portugis pun dilanjutkan oleh Putra dari Sultan Mahmud Syah I, yaitu Alauddin Ri'ayat Syah II. Rakyat Johor melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis hingga perjuangan melawan penjajahan Portugis di daerah Johor dilanjutkan oleh Abdul Jali I serta dapat melawan serangan dari bangsa Portugis.

Pasukan Demak pun ikut membantu perlawanan terhadap bangsa Portugis. Di bawah pimpinan Dipati Unus (Pangeran Sabrang Lor), mereka melakukan penyerangan pada 1512–1523. Tentara Demak dibantu oleh berbagai daerah yang ada di daerah Palembang, Aceh, dan Bintan. Tentara Demak berusaha sekuat tenaga merebut kembali Malaka dari tangan Portugis. namun perjuangan ini tidak berhasil. Setelah perlawanan dari daerah Malaka tidak berhasil, Portugis pun menyebarkan kekuatannya untuk menguasai daerah-daerah yang ada di Nusantara.

Setelah tentara Demak tidak berhasil merebut Malaka dari tangan Portugis, Fatahillah atau Faletahan yang merupakan ulama dari Demak ikut membantu melawan Portugis. Faletahan merupakan ulama yang menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat. Bangsa Portugis yang ada di Sunda

Kelapa diserang oleh tentara pimpinan Fatahillah pada 1527 serta berhasil mengalahkan bangsa Portugis. Karena kalah menghadapi perlawanan rakyat Sunda Kelapa Portugis kembali lagi ke Malaka. Akibat itulah daerah Sunda Kelapa diganti dengan nama Jayakarta yang artinya kemenangan akhir dan kemudian berdirilah Kerajaan Banten.

Setelah menguasai Malaka, Portugis pun ingin menguasai daerah yang kaya akan rempah-rempah, yaitu daerah Maluku. Untuk dapat datang ke Maluku awalnya bangsa Portugis melakukan hubungan perdagangan dengan para saudagar yang ada di daerah Maluku Utara, yaitu Sultan Hairun. Namun, karena daerah Maluku yang menjadi pusat rempah-rempah di Nusantara menjadi daya tarik bagi bangsa Portugis untuk menguasai daerah ini, maka Portugis ingin memonopoli perdagangan yang ada di daerah Maluku serta menindas rakyat Maluku. Hal inilah yang membuat rakyat Maluku tidak senang akan kehadiran bangsa Portugis di daerah Maluku. Di bawah Sultan Hairun, rakyat Maluku mulai melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis pada 1550.

Pada akhirnya, Portugis dapat menguasai Maluku, yaitu dengan cara membuat perjanjian yang sangat licik dengan Sultan Hairun. Bangsa Portugis berdalih ingin mengadakan perdamaian, namun ternyata malah membunuh Sultan Hairun. Perjuangan rakyat Maluku dalam menghadapi tentara Portugis pun dilanjutkan oleh Sultan Baabullah, yaitu putra Sultan Hairun. Di bawah pimpinan Sultan Baabullah, rakyat yang ada di sekitar daerah Maluku seperti Ternate, Tidore, dan Halmahera bersatu untuk melawan bangsa Portugis supaya terusir dari daerah kaya akan rempah-rempah ini pada 1570—1575. Portugis pun dapat diusir dari tanah rempah-rempah ini pada 1577 oleh rakyat Maluku Utara.

## B. Perjuangan Melawan Penjajahan Belanda

### 1. Perlawanan di Banten

Pada 1596, Bangsa Belanda mendarat di Banten untuk pertama kalinya yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Ketika itu kedatangan bangsa Belanda disambut baik oleh masyarakat Banten. Masyarakat Banten berharap Belanda menjadi mitra dagang bagi para pedagang yang ada di Banten. Akan tetapi, rakyat Banten mulai merasa tidak suka dan mengadakan perlawanan terhadap Belanda karena pada 1619, VOC menduduki Jayakarta untuk memonopoli perdagangan di Banten. Padahal di Banten telah berdiri kerajaan Islam yang berdaulat penuh dengan raja pertamanya Sultan Hasanuddin dan Jayakarta yang diduduki bangsa Belanda merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Banten.

Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, 1652—1682, perlawanan Banten mencapai puncaknya. Namun perlawanan ini gagal. Politik adu domba yang diterapkan Belanda dapat memecah belah antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji yang merupakan putra mahkota kerajaan. Sultan Ageng Tirtayasa ditawan di Batavia oleh VOC, sedangkan Sultan Haji dinobatkan menjadi raja oleh VOC dengan syarat menyerahkan kekuasaan daerahnya pada VOC.

### 2. Perlawanan di Maluku

Sejak awal kedatangannya, rakyat Maluku sudah menentang keberadaan bangsa Belanda di daerahnya. Hal ini disebabkan monopoli perdagangan yang dilakukan Belanda terhadap rakyat pribumi. Cara-cara kejam terus dilakukan Belanda demi memelihara kelangsungan monopoli perdagangannya, misalnya dengan adanya pelayaran *Hongi*, yang artinya melakukan pengawasan perdagangan rempah-rempah dan memusnahkan pohon-pohon cengkik penduduk yang dianggap akan mengganggu kelancaran monopolinya.

Kekejaman Belanda terhadap rakyat pribumi membangkitkan kemarahan sehingga menimbulkan perlawanan-perlawanan dari masyarakat Maluku dengan bentuk-bentuk perlawanan seperti berikut ini.

- a. Perlawanan dilakukan oleh rakyat Hitu di bawah pimpinan Kakiali dan Telukabesi pada 1635—1646. Perlawanan ini mendapat bantuan dari Ternate dan Amboina. Politik adu domba kemudian memecah belah antara Hitu dan Ternate, dengan cara VOC mengakui kedaulatan Sultan Ternate atas daerah Ambon, kemudian VOC menangkap Kakiali sehingga perlawanan ini gagal.
- b. Rakyat Hitu kembali melakukan perlawanan setelah ditangkapnya Kakiali, dengan dipimpin oleh Pattiwani sehingga Kakiali dibebaskan oleh VOC.
- c. Perlawanan rakyat Hitu tidak berhenti meskipun mereka sudah berdamai kembali dengan Ternate. Kali ini mereka mendapat dukungan dari pelaut Makassar. Namun, perlawanan mereka kembali gagal, hal ini disebabkan rakyat pribumi mudah dihasut dan diadu domba oleh Belanda sehingga perpecahan kembali terjadi dan Kakiali akhirnya dibunuh oleh penasihatnya bersama dengan pemimpin lainnya serta keluarganya.
- d. Peristiwa pembunuhan Kakiali dan keluarganya tidak menyurutkan keberanian rakyat Hitu. Perlawanan rakyat Hitu kembali berkobar kali ini dipimpin oleh Telukabesi. Akhirnya, perlawanan rakyat Hitu berhenti setelah Telukabesi menyerah dan dihukum pancung pada 1646.
- e. Perlawanan terhadap VOC kini datang dari Tidore dipimpin Sultan Nuku dari 1780—1805, dengan wilayah kekuasaannya sampai Seram, Papua. Kerajaan Tidore pada masa kepemimpinan Sultan Nuku tidak dapat dilumpuhkan oleh VOC hingga wafatnya Sultan Nuku yang bergelar *Sri Paduka Maha Tuan Sultan Saidul Jihad Muhammad al Mabus Syaituddin Syah Kaicili*.

### 3. Perlawanan di Mataram

Hubungan rakyat Mataram dengan pihak Belanda tidak pernah bersahabat. Sikap pimpinan VOC terhadap masyarakat sangat buruk sehingga menimbulkan penyerbuan dari rakyat Mataram terhadap VOC pada 18 Agustus 1618.

Suasana permusuhan terus berlangsung hingga tahun 1628 dan mencapai klimaksnya pada 22 Agustus 1628. Pasukan Mataram menyerang Kota Batavia di bawah pimpinan Bahureksa. Dalam pertempuran ini Mataram mengalami kekalahan dan banyak korban jatuh di pihak Mataram. Hal itu disebabkan persenjataan yang dimiliki VOC lebih banyak dan lebih modern. Pihak Mataram mengalami kerugian besar. Perahu-perahu yang merupakan armada perang dihancurkan. Bahureksa beserta putranya gugur dalam pertempuran ini.

Perlawanan pasukan Mataram berikutnya dipimpin Kyai Dipati Mandurareja, Tumenggung Sura Agul-agul, dan Upasanta. Dengan menggunakan taktik membendung sungai, perlawanan ini kembali mengalami kegagalan dan menyebabkan Dipati Mandurareja dan Upasanta dihukum mati.

Dengan persiapan yang matang, pada tahun 1629, Mataram kembali menyerang. Sebagai bekal di perjalanan didirikanlah gudang-gudang perbekalan. Namun semuanya dibakar habis oleh VOC. Pertempuran ini berhasil diatasi Belanda dan Jan Pieterszoon Coen meninggal secara mendadak karena sakit. Hubungan antara VOC dan Mataram tidak pernah membaik dan perlawanan pun terus berlangsung hingga meninggalnya Sultan Agung pada 1645.

### 4. Perlawanan Trunojoyo

Keadaan semakin menjepit Mataram. VOC memblokir sepanjang pesisir Pantai Jawa sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Mataram. Melihat keadaan seperti ini, putra mahkota Kerajaan Mataram yang bernama Amangkurat I

pada 1646 mengadakan perjanjian persahabatan dengan VOC, isi perjanjian tersebut, antara lain:

1. bahwa Mataram mengakui kedaulatan VOC atas Batavia;
2. Mataram diperbolehkan berdagang dengan daerah luar, kecuali dengan Ternate, Ambon, dan Banda;
3. jika Mataram dengan Malaka mengadakan pelayaran, maka harus seizin VOC.

Akibat dari isi perjanjian tersebut, yang dinilai banyak merugikan Mataram, timbul reaksi keras dan kemarahan terhadap Amangkurat I dari berbagai daerah kekuasaan Mataram. Misalnya, pemberontakan yang dilakukan Trunojoyo, Giri, dan Kraeng Galesung.

Pemberontakan Trunojoyo disebabkan kekesalannya kepada Bupati Madura yang bernama Cakraningrat II karena sikapnya yang tidak peduli dengan penderitaan rakyat. Ia malah bersenang-senang di keraton. Trunojoyo sendiri adalah pangeran dari Madura. Pada 1674, ia mengadakan pemberontakan terhadap Cakraningrat sehingga Cakraningrat berhasil didepak. Pemberontakan lain dilakukan oleh Giri yang memberontak Amangkurat I.

Perjuangan Trunojoyo dalam pemberontakan melawan Amangkurat I mendapat bantuan dari Kraeng Galesung dari Makassar sehingga Ibu Kota Kartasura direbut Trunojoyo dan Amangkurat meninggal dunia di sebuah desa, yakni Desa Tegal Arum. Sebelum meninggal, Amangkurat I berpesan kepada putranya, yaitu Adipati Anom, supaya meminta bantuan VOC untuk menumpas pemberontakan Trunojoyo.

Atas permintaan ayahnya, Adipati Anom pada 1677 meminta bantuan VOC untuk menghadapi Trunojoyo. Permintaan Adipati Anom tentu saja dijadikan kesempatan oleh VOC dengan meminta imbalan sangat tinggi, yaitu semua pelabuhan

di pantai utara Pulau Jawa dari Karawang sampai Jawa Timur dikuasai VOC, sedangkan daerah sebelah barat kali Pamanukan menjadi milik VOC.

Pertempuran terjadi antara VOC dan Trunojoyo, karena kalah dalam persenjataan Trunojoyo terdesak dan dibunuh oleh Adipati Anom pada 1679. Adipati Anom dinobatkan menjadi raja dan bergelar Sunan Amangkurat II.

### 5. Perlawanan di Gowa

Di Gowa terdapat kerajaan Islam Gowa-Tallo. Karena terletak di Makassar, maka disebut Kerajaan Makassar, tepatnya terletak di Sombaopu.

Kedudukan Gowa dalam hubungan perdagangan adalah sebagai bandar transit dalam kegiatan berdagang, baik kapal dari Maluku maupun yang menuju Maluku. Kedudukan strategis seperti itu tentu saja membangkitkan minat Belanda untuk memperoleh hak monopoli perdagangan di Gowa.

Dalam usaha untuk memperoleh hak monopoli perdagangan, VOC mendekati Raja Gowa dan berusaha membina hubungan baik. Cara halus yang digunakan VOC dalam merebut hati Raja Gowa akhirnya membuahkan hasil. Raja Gowa menerima tawaran hubungan dagang dengan VOC. Namun, setelah waktu berjalan ternyata VOC melakukan pelarangan terhadap Gowa untuk berdagang dengan pihak lain, termasuk dengan Maluku.

Pelarangan-pelarangan yang dilakukan VOC akhirnya menimbulkan ketegangan antara keduanya sehingga terjadi peperangan antara 1654–1655. Pihak VOC memblokade daerah Sombaopu dan melakukan penyerangan terhadap Maluku. Namun, para pelaut Makassar berhasil lolos dan mereka membantu rakyat Maluku melawan VOC.

Akibat dari kerugian ketika menghadapi perlawanan rakyat Gowa dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar, pihak Belanda pada 27 Februari 1656, mengadakan perdamaian

dan perjanjian dengan pihak Gowa. Isi dari perjanjian itu bahwa kedua belah pihak harus menyerahkan tawanan masing-masing. Perjanjian tersebut sebenarnya hanya siasat VOC untuk mengulur-ulur waktu sebagai persiapan untuk menghadapi pelaut-pelaut Makassar dengan kekuatan militer secara penuh.

## 6. Perlawanan Untung Surapati

Untung ialah seorang budak dari Bali. Ia dibeli oleh pedagang dari Belanda dan dijadikan pegawai VOC. Kesalahan yang dibuatnya, yaitu menjalin hubungan dengan seorang gadis yang merupakan putri dari tuannya, menyebabkan ia dipenjara. Di dalam penjara ia memimpin teman-temannya untuk mendobrak pintu penjara dan kemudian ia merampok orang-orang Belanda. Untung kemudian menjadi buonan, Belanda selalu menemui kegagalan dalam menangkapnya.

Di sisi lain, VOC sedang berusaha melakukan penangkapan terhadap Pangeran Purbaya, putra Sultan Ageng Tirtayasa yang meloloskan diri. Dalam usahanya VOC menarik kelompok Untung untuk membantunya menangkap Pangeran Purbaya. Kelompok Untung berhasil menangkap Pangeran Purbaya. Namun setelah hampir mendekati Batavia, untung berubah pikiran karena mendapat penghinaan dari pimpinan pasukan VOC dan ia memutuskan untuk kembali melawan VOC.

Ketika bergerilya melawan VOC di wilayah Priangan dan melanjutkan perjalanan ke Cirebon, ia terlibat perkelahian dengan seorang pangeran dari Cirebon yang bernama Surapati. Untung dituduh telah melakukan pembangkangan terhadap Sultan Cirebon. Namun, ia selamat dari tuduhan tersebut dan Surapati yang kemudian dipersalahkan, dan akhirnya dihukum mati. Setelah kejadian itu, Untung dijuluki nama baru, yaitu dengan sebutan *Untung Surapati*.

Ketika Mataram dipimpin oleh Sunan Amangkurat II, Untung Surapati melanjutkan perjuangan di wilayah Mataram.

Dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda, Sunan Amangkurat II merangkul Untung. Namun ia menyadari akan kelicikan Sunan ketika menjerumuskan Trunojoyo. Maka, setelah berhasil membunuh Kapitan Tack dan anak buahnya Untung pun menyingkir ke Jawa Timur. Kapitan Tack adalah utusan Belanda yang bertugas untuk menangkap Untung Surapati.

Perjuangan Untung Surapati dalam melawan VOC semakin kuat dengan dibangunnya pusat perjuangan terhadap VOC di Pasuruan Jawa Timur yang bernama *Wiranegara*. Hal ini dilakukan VOC dengan tujuan untuk mendapatkan simpati dari rakyat Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan membangkitkan semangat anti-Belanda. Wiranegara dipimpin dan diperintah oleh Untung Surapati sendiri.

Konflik lain terjadi antara Pangeran Puger yang merupakan adik dari Amangkurat II dan Amangkurat III atau Sunan Mas. Konflik ini terjadi karena perbedaan prinsip. Pangeran Puger memihak Belanda, sedangkan Sunan Mas anti-Belanda. Dalam konflik ini, tentu saja VOC memilih Pangeran Puger.

Kemudian Pangeran Puger dan VOC membuat sebuah perjanjian dan menandatangani di Semarang. Isi perjanjian tersebut, antara lain sebagai berikut.

- a. Semua daerah sebelah Cilosari sampai dengan Cilacap dan Madura Timur diserahkan kepada VOC.
- b. Setiap tahun Mataram sanggup membayar 800 koyan beras selama 25 tahun.
- c. VOC berhak menempatkan 200 orang tentaranya dalam benteng VOC di Ibu Kota Kartasura.

Oleh karena telah berhasil memperoleh kemenangan, Pangeran Puger dinobatkan menjadi susuhunan oleh VOC dengan nama Pakubuwono I.

Sunan Mas yang meninggalkan Kartasura setelah kekalahan dari Pangeran Puger bergabung dengan Untung Surapati yang bertahan di Kediri, Bangil, Pasuruan, dan Belambangan pada 1706. Untung Surapati gugur dalam pertempuran besar di Bangil. Sepeninggalnya Untung Surapati, Sunan Mas menghentikan perlawanan dan menyerahkan diri kepada VOC. Kemudian pada 1708 ia diasingkan ke Sallan.

Perlawanan dilanjutkan oleh keturunan Untung Surapati dengan semangat berkobar dan pantang menyerah. Namun akhirnya, mereka kalah dan Herman de Wilde, seorang panglima VOC, berhasil menduduki Pasuruan. Ia kemudian menemukan dan membongkar makam Surapati, sisa-sisa jenazah pahlawan perkasa itu kemudian dibakar dan abunya dibuang ke laut.

Pada abad ke-18, tepatnya pada 11 Desember 1749, ketika Sunan Pakubuwono sakit keras, VOC memaksa pengakuan Sunan untuk menyerahkan Mataram. Kejadian tersebut menyulut kemarahan rakyat Mataram dan menimbulkan perlawanan di seluruh daerah kekuasaan Mataram, walaupun VOC segera mengangkat putra mahkota menjadi Sunan Pakubuwono III.

Antara Mataram dan VOC terjadi perebutan takhta, sehingga akhirnya terjadi pembagian wilayah. Wilayah VOC meliputi daerah Jawa Barat, seluruh daerah utara Jawa Tengah, dan Jawa Timur serta Madura. Adapun wilayah Mataram meliputi Yogyakarta (di bawah Hamengkubuwono I), daerah Surakarta di bawah Pakubowono III, dan daerah Mangkunegara, dalam lingkungan Surakarta di bawah Pangeran Adipati Mangkunegara.

Kekejaman VOC menyebabkan perlawanan terjadi di mana-mana, seperti yang terjadi di Banten. Di bawah pimpinan Kyai Tapa dan Ratu Bagus Buang, rakyat Banten mengadakan perlawanan sampai ke daerah Batavia dan Jawa

Barat. Perlawanan ini berhasil membinasakan daerah kolonisasi Belanda di daerah Cipanas, Cianjur di bawah pimpinan Kyai Tapa.

Pada 31 Desember 1799, VOC dibubarkan oleh pemerintahan Belanda yang disebabkan banyaknya persoalan-persoalan yang mengakibatkan kemunduran VOC. Persoalan-persoalan itu, di antaranya sebagai berikut.

- a. Pengurus kompeni tidak mampu menaikkan gaji pegawai karena keadaan uang sehingga banyak pegawai VOC yang melakukan korupsi.
- b. VOC tidak mampu bersaing dengan Inggris dan Prancis.
- c. Semakin berkurangnya modal akibat meruginya VOC, tetapi *dividen* masih tetap diberikan kepada pemegang saham.
- d. Terjadinya peperangan melawan Inggris 1780–1784 yang dimenangkan Inggris, dan banyak mengeluarkan biaya.

Dengan adanya pengaruh Revolusi Prancis, di negeri Belanda muncul dua aliran politik kolonial berkenaan dengan pelaksanaan penjajahan di Indonesia waktu itu, yaitu aliran kolot dan aliran yang lebih maju. Aliran kolot dipimpin oleh Nederburg. Menurut aliran ini untuk mempertahankan monopoli kopi dan lada serta mempertahankan *conlingenten* dan *verplichte leverantien*, rodi perlu dipertahankan. Oleh karena itu, tindakan-tindakan paksaan harus tetap dilaksanakan karena rakyat sudah terbiasa dengan cara kekerasan.

Aliran yang lebih maju dan progresif dipimpin oleh van Hogendorp. Menurut aliran ini untuk pemerintahan harus dipisahkan dari perdagangan karena pegawai bukanlah pedagang. Pedagang terbuka bagi siapa saja, *stelsel* masyarakat feodal harus dihilangkan, petani adalah pemilik tanah, berbagai bentuk penyerahan paksa dihapuskan dan perlu diganti dengan

perdagangan bebas, rodi mesti dihapuskan diganti dengan pajak kepala.

Herman Williem Daendels dikirim ke Indonesia pada 1808 dengan tujuan untuk mempertahankan tanah jajahan milik Belanda di wilayah Timur, khususnya Pulau Jawa. Ia berusaha keras untuk mengisi kas negara dengan berbagai cara, antara lain melaksanakan tindakan mencetak uang kertas dalam jumlah besar, melakukan penjualan atas tanah-tanah yang dikuasai oleh pemerintah, dan meminjam uang dari hartawan swasta.

Tindakan-tindakan Daendels sangat keras dan kasar mengakibatkan banyak raja kaum pribumi sakit hati dan tidak simpati pada Belanda. Banyak kaum pribumi menaruh simpati terhadap Inggris. Tindakan-tindakan Belanda tersebut banyak merugikan penduduk pribumi sehingga menimbulkan reaksi dari kaum pribumi. Pemerintah Belanda pun menarik pulang Daendels dan menggantikannya dengan Janssens. Pada masa Janssens Pulau Jawa jatuh ke tangan Inggris.

Pucuk pimpinan penjajahan Inggris di Indonesia adalah Raffles. Ia berpangkat Letnan Gubernur Jenderal di bawah komando Gubernur Jenderal Lord Minto di India. Masa penjajahan Inggris berlangsung antara 1811-1816. Pada zaman kekuasaan Inggris, diberlakukan prinsip-prinsip liberal. Negara Inggris menghendaki penduduk yang dijajahnya hidup dalam kemakmuran karena pada akhirnya juga akan menguntungkan negara Inggris. Tindakan yang paling dikenal pada waktu penjajahan Inggris adalah tindakan *Landrente*. Pokok pikiran *Landrente* bahwa tanah jajahan adalah tanah gubernemen (pemerintah). Oleh karena itu, semua pemakai tanah dikenakan kewajiban membayar sewa pemakaian tanah. Untuk pembayaran pajak, boleh dibayar dengan uang atau *natura*. Sistem perpajakan tanah yang besarnya didasarkan atas tingkat kesuburan tanah. Tentu saja pokok pikiran semacam ini memberatkan kehidupan rakyat sehingga gagal mencapai

sasaran karena masyarakat Jawa pada waktu itu belum dapat disetarakan dengan kondisi kehidupan masyarakat India, yang mana sistem ini dilaksanakan Inggris.

Palembang, di bawah pimpinan Sultan Baharuddin, adalah salah satu daerah yang menolak kekuasaan Inggris. Akan tetapi, Inggris mampu memaksakan kekuasaannya dengan kekerasan pada 1812. Pada 1815, Banjarmasin berhasil ditundukkan dengan kekuatan militer Raffles. Inggris juga bertindak keras terhadap Surakarta dan Yogyakarta yang dianggap bersekongkol dalam menentang Inggris. Pasukan tentara di bawah Gillespie dikirimkan ke Yogyakarta, dan Sultan Sepuh ditangkap serta diasingkan ke Pulau Pinang. Sultan Sepuh digantikan oleh Hamengkubuwono III, yang terpaksa harus menerima pengurangan wilayah kekuasaannya. Pangeran Natakusuma diberi 4.000 cacah sebagai imbalan karena jasanya kepada Raffles dengan gelar Paku Alam dan wilayahnya disebut Paku Alaman.

Sementara itu, di Eropa terjadi perubahan baru ketika Napoleon Bonaparte jatuh, ia kalah dalam pertempuran besar di Leipzig pada 1813. Untuk mengantisipasi kemungkinan kembalinya agresi Prancis, Kongres Wina sepakat untuk membentuk pertahanan bersama, yaitu dengan memperkuat Belanda agar dapat berfungsi sebagai benteng pertahanan di utara Prancis. Di bawah pemerintahan pro-Inggris, Belanda menerima kembali semua tanah jajahannya, kecuali Afrika dan Sialan. Belanda menerima kembali tanah jajahannya dari Inggris melalui Konvensi London. Pelaksanaan serah terima kembali tanah jajahan di Indonesia baru bisa dilaksanakan pada 1816, tetapi Raffles tidak setuju dengan penyerahan tanah jajahan ini sehingga ia meletakkan jabatannya. John Fendall ditunjuk untuk memimpin penyerahan kembali tanah jajahannya di Indonesia kepada Belanda.

Pemerintahan negeri Belanda mengirimkan sebuah komisi untuk menangani berbagai persoalan di tanah jajahan, komisi

ini terdiri atas tiga orang, yaitu Cornelis Th. Elout sebagai ketua, A.A. Buyskes, dan van der Capellen sebagai anggota. Komisi ini dihadapkan pada dua alternatif, yaitu melaksanakan sistem lama dengan mencontoh kompeni atau melanjutkan sistem yang dilakukan Inggris yang menerapkan liberalisme ala Raffles. Komisi ini lebih cenderung melanjutkan sistem liberal mencontoh Raffles. Pada 1819, komisi ini dibubarkan, dan van der Capellen diangkat menjadi Gubernur Jenderal dari 1819 sampai 1826. Sesungguhnya Elout dan Buyskes lebih menyukai politik pemerintahan yang liberal. Dalam pidato perpisahannya, Elout menegaskan pendiriannya bahwa di samping keuntungan yang diharapkan oleh negara induk, pemerintah van der Capellen di tanah jajahan jangan melupakan kesejahteraan penduduk. Ternyata van der Cappelen tidak mau melaksanakan sistem atau cara-cara liberal seperti yang dikehendaki Elout. Penguasaan tanah-tanah oleh partikelir dilarangnya. Ia juga mengeluarkan larangan persewaan tanah kepada orang Eropa di daerah Yogyakarta dan Surakarta. Akibat peraturan itu datang setelah para penyewa membayarkan uang sewanya, maka banyak para pemilik tanah dan bangunan terpaksa harus mengembalikan uang sewa yang terlanjur telah diterimanya. Mereka merasa dirugikan. Mereka memendam dendam terhadap pemerintah jajahan.

Lama-kelamaan semakin jelas saja arah politik kolonial Belanda setelah mereka menerima tanah jajahan dari Inggris, bahwa mereka semakin cenderung ke arah monopolistik kembali dengan menerapkan bermacam ragam pajak dengan jumlah yang sangat memberatkan kehidupan rakyat. Dari tindakan-tindakan inilah, rakyat mengadakan berbagai perlawanan sepanjang abad ke-19 seperti di Maluku, Jawa, Sumatra, dan daerah lainnya.

### **C. Timbulnya Perlawanan terhadap Bangsa Belanda**

Pada abad ke-19, hampir seluruh daerah mengadakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda karena



Belanda terus memperluas daerah jajahan di seluruh tanah air dengan kekerasan dan penggunaan kekuatan militer. Perlawanan-perlawanan tersebut adalah sebagai berikut.

### 1. Perlawanan Rakyat Maluku (1817)

Dengan adanya tekanan dari Belanda yang mengakibatkan rakyat sengsara, rakyat Maluku bangkit untuk mengangkat senjata melawan penjajah Belanda. Pimpinan perlawanan dari rakyat Maluku adalah Thomas Matulesy yang lebih dikenal dengan Pattimura. Pattimura dan pasukannya melawan dan menyerbu benteng Belanda di Saparua, Benteng Duurstede. Kemudian pertempuran berkobar di pulau-pulau lain. Benteng Duurstede dapat direbut dengan korban yang jatuh cukup banyak di kedua belah pihak. Residen Belanda di Saparua bernama van den Berg bersama istrinya tewas dalam insiden penyerbuan itu. Akan tetapi, akhirnya perlawanan rakyat Maluku dapat dilumpuhkan. Belanda melakukan tindakan-tindakan keras secara besar-besaran di Saparua, Ambon, dan Haru. Pattimura dan kawan-kawannya ditangkap dan dihukum mati pada 16 Desember 1817. Dalam peristiwa itu, terkenal pula seorang pejuang wanita Maluku yang bernama Martha Christina Tiahahu.

### 2. Perlawanan Kaum Padri (1821—1837)

Pada abad ke-19 sudah banyak orang Minangkabau yang melakukan ibadah haji sehingga tergerak hatinya untuk melakukan perubahan kehidupan masyarakat Islam yang sesuai dengan ajaran Al Quran dan Hadis. Tokoh utama penggeraknya ialah Haji Miskin dari Pantai Sikat, Haji Sumanik dari VII Kota dan Haji Piabang dari Tanah Datar. Gerakan pembaharuan kehidupan masyarakat atas dasarkan agama ini dikenal dengan "Kaum Padri". Akan tetapi, golongan lain yang tidak menyukai Kaum Padri ini, dipimpin oleh pemuka-pemuka adat melakukan perlawanan sehingga timbul permusuhan yang mengakibatkan



pertempuran di berbagai tempat. Tokoh pimpinan Kaum Padri yang paling kuat ialah Tuanku Imam Bonjol yang berkedudukan di daerah Bonjol.

Ketika 1818, Raffles pernah berkunjung ke Padang. Raffles menjanjikan bantuan kepada Kaum Adat, khususnya kepada pemimpin Kaum Adat dari Suroaso, tetapi Kaum Padri menolak bekerja sama dengan Inggris. Pada saat Inggris harus menyerahkan kekuasaan Belanda, Kaum Adat juga meminta bantuan kepada Belanda untuk menumpas gerakan Kaum Padri. Campur tangan Belanda inilah yang menyebabkan Perang Padri memasuki babak baru, yaitu perlawanan menentang kekuasaan kolonial Belanda yang dibantu oleh Kaum Adat.

Selain Tuanku Imam Bonjol, tokoh-tokoh besar Kaum Padri lainnya adalah Tuanku Pasaman, Tuanku nan Renceh. Mereka berperan besar dalam menentang Belanda. Sementara itu, Datuk Bandaro pemuka adat yang memihak Kaum Padri di Alahan Panjang juga berperan dalam menentang Belanda. Akan tetapi, Belanda berhasil mendesak kedudukan Kaum Padri dan mendirikan benteng di Batusangkar. Walaupun demikian, Belanda kesulitan menumpas gerakan ini. Perlawanan semakin merata di seluruh daerah Minangkabau. Sampai 1824, Belanda gagal menundukkan perlawanan Kaum Padri. Belanda melakukan perundingan dengan Kaum Padri yang tentu saja dilanggar oleh Belanda.

### 3. Perlawanan Pangeran Diponegoro (1825—1830)

Sebagai seorang wali dari sultan, Pangeran Diponegoro merasa kecewa dengan kuatnya pengaruh Belanda dalam kehidupan istana. Ia mulai memusatkan perhatiannya kepada soal-soal agama dan meninggalkan Istana. Tanpa seizin Pangeran Diponegoro, Belanda membuat jalan kereta api dengan melintasi tanah pemakaman leluhur yang membuat Pangeran Diponegoro tersinggung. Akhirnya, ketegangan antara kedua belah pihak mencapai puncaknya pada 20 Juli 1825, Pangeran

Diponegoro mengangkat senjata, rakyat pun mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro. Setelah Belanda membakar tempat tinggal beliau, Pangeran Diponegoro menyingkir ke Bukit Selarong. Gelora Perang Sabil dikumandangkan ke seluruh Mataram. Diponegoro mendapat dukungan penuh dari Pangeran Mangkubumi, Kyai Mojo (penasihat keagamaan), dan Sentot Prawirodirjo (pembantu utama di bidang strategi militer). Daerah-daerah yang bangkit melawan Belanda adalah Pacitan, Purwodadi, Banyumas, Pekalongan, Semarang, Rembang, dan Madiun. Pertempuran besar terjadi di berbagai tempat. Pengikut Diponegoro banyak memperoleh kemenangan dalam perang. Luasnya daerah peperangan serta taktik gerilya yang dilancarkan pasukan-pasukan Diponegoro, memaksa Belanda mengerahkan kekuatannya. Upaya perdamaian pada 1827 gagal. Namun, dengan liciknya Belanda menjalankan siasat perang, yaitu "Benteng Stelsel". Sistem benteng ini mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro.



Sumber: *Ensiklopedi Tema Dunia Islam Jilid 4*, 2006

Menjelang tahun 1829, kekuatan pasukan Diponegoro mulai terdesak karena Belanda terus-menerus meningkatkan kekuatannya dengan mendatangkan pasukan baru dari berbagai daerah. Akhirnya, banyak para pembantu Diponegoro terpaksa menyerah atau tertangkap. Pangeran Suryamataram dan Ario Prangwedono tertangkap. Pangeran Serang dan Pangeran Notoprojo tertangkap. Sentot Prawirodirdjo menyerah pada 1829, sedangkan pemimpin pasukan lainnya gugur dalam peperangan. Pangeran Mangkubumi sendiri menyerah pada September 1829. Sementara itu, Kiyai Mojo telah lebih dahulu ditangkap oleh Belanda. Dengan demikian, Pangeran Diponegoro mendapat pukulan berat, tetapi semangat perjuangan tetap berkobar. Beliau masih tetap teguh pada pendiriannya untuk berjihad melawan kekuasaan asing. Jenderal De Kock berusaha mengadakan pembicaraan dengan Pangeran Diponegoro. Pada 21 Februari 1830, Diponegoro beserta pasukan pengiringnya datang ke Bukit Menoreh, pertemuan sering dilakukan antara Pangeran Diponegoro dan Belanda seperti pada tanggal 8 Maret 1830 di Kota Magelang, kemudian perundingan diadakan di rumah residen Kedu pada 28 Maret 1830. Untuk menangkap Diponegoro, Jenderal De Kock mulai mengatur siasat. Di dalam perundingan Diponegoro menuntut agar Belanda mengakui Diponegoro sebagai pemimpin umat Islam seluruh Jawa, perundingan ternyata gagal. Diponegoro ditangkap, dengan kereta yang dipersiapkan, Diponegoro diangkut ke Semarang selanjutnya dibawa ke Batavia. Pada Mei 1830, diangkut ke tempat pembuangannya di Manado. Pada 1834, dipindahkan ke Makassar. Pangeran pejuang ini wafat pada 18 Januari 1855 di Makassar.

#### 4. Perlawanan Rakyat Sulawesi

Belanda melakukan penyerangan terhadap Bone, maka terjadilah perlawanan rakyat Bone yang berlangsung cukup lama. Perang Bone melawan Belanda pertama berlangsung

antara 1825 sampai 1835 tetapi perlawanan muncul lagi pada 1859. Perang tahap pertama berakhir pada 1835. Raja Bone, La Mappaseling Arung Panyili berdamai dengan Belanda yang diwakili Kolonel van Krovel pada 13 Agustus 1835. Akan tetapi, pada 1859 permusuhan kembali terjadi sehingga Raja Bone, Basse Kajuara, bangkit menentang kekuasaan asing dan memimpin sendiri peperangan. Di bawah komando Letnan Jeneral van Swieten dan Mayor H.C. Staring, Belanda mengerahkan kemampuan untuk menghadapi kekuatan Bone yang kuat tetapi akhirnya Bone dapat dikalahkan, Raja Basse Kajuara, meloloskan diri ke Sawitto. Untuk itu, Belanda mengangkat Ahmad Singkerurukha Aru Palaka sebagai Raja Bone.

Belanda mengirimkan ekspedisi militer ke Sulawesi Tengah dipimpin Kapten C. van den Hart pada 1850 untuk memaksakan penandatanganan pengakuan Raja Pari, Iskandar Abd. Muhammad. Kemudian gubernur di Makassar juga memaksa Raja Kalli (Banawa; Palu, dan Tawaeli) untuk mengakui kekuasaan Belanda atas daerahnya. Pada umumnya, raja-raja di Sulawesi Tengah tak mau mematuhi walaupun sudah menandatangani pengakuan tersebut.

Perang pecah di Pantai Kayumalue yang disebabkan tidak patuhnya raja-raja Sulawesi terhadap Belanda. Oleh sebab itu, pada 1888 Gubernur Belanda di Makassar datang membawa pasukan dengan tiga buah kapal perang sehingga perlawanan rakyat tak mampu mengimbangi kekuatan militer Belanda yang datang dengan pasukan dan persenjataan kuat. Akhirnya, raja-raja di daerah ini terpaksa harus menandatangani pengakuan kekuasaan Belanda atas wilayah kerajaan-kerajaan di Sulawesi Tengah.

## **5. Perlawanan di Kalimantan**

Pada masa pemerintahan Sultan Adam (1825—1857), Belanda pada 1851 mengangkat Pangeran Tamjidillah

sebagai Mangkubumi. Ia seorang pangeran yang disukai Belanda karena banyak memberikan bantuan bagi kelancaran perdagangan Belanda. Tamjidillah memberikan harapan bagi Belanda jika pada suatu saat ia diangkat menjadi sultan. Pada 1852, Pangeran Abdurrahman meninggal dunia. Belanda kemudian mengangkat Tamjidillah menjadi Sultan Muda. Tindakan Belanda ini menyebabkan reaksi sangat keras, baik dari Sultan Adam sendiri maupun dari rakyat yang tidak menyukai Tamjidillah yang memihak Belanda. Rakyat menuntut agar Pangeran Hidayat, cucu Sultan Adam, diangkat sebagai Sultan Muda, dan pamannya Prabu Anom diangkat menjadi Mangkubumi. Ternyata, Belanda bertindak lain. Untuk meredakan kemarahan rakyat yang tidak setuju atas pengangkatan Tamjidillah sebagai Sultan Muda, Belanda setuju mengangkat Pangeran Hidayat sebagai Mangkubumi. Sepeninggalnya Sultan Adam pada 1857, Belanda melantik Tamjidillah sebagai Sultan. Sementara itu, Pangeran Hidayat sebagai Mangkubumi diperintahkan untuk segera membawa Prabu Anom, pamannya. Perlakuan Belanda yang tidak adil ini menimbulkan perlawanan rakyat. Perlawanan rakyat menentang Tamjidillah dan Belanda berkobar pada 1859 dipimpin oleh Pangeran Antasari. Sementara, Prabu Anom diasingkan ke Bandung. Tokoh-tokoh perlawanan lainnya adalah Kyai Demang Leman, Haji Nasrun, Haji Buyasin, dan Kyai Langlang. Pangeran Hidayat juga aktif memimpin pasukan melawan Belanda. Akibatnya Belanda memecatnya sebagai mangkubumi. Pada 1860, jabatan sultan kosong karena Tamjidillah tidak mampu lagi memerintah dan menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Belanda. Kerajaan Banjar dihapuskan oleh Belanda dan langsung diperintah pemerintah Belanda. Akan tetapi, perlawanan berlangsung terus yang pada akhirnya perlawanan rakyat pun dapat dengan mudah dikalahkan oleh Belanda. Satu demi satu pemimpin perlawanan

dapat ditangkap, diasingkan. Pada 1862, Pangeran Hidayat dapat ditangkap, dibuang ke Jawa. Pangeran Antasari berjuang terus sampai meninggal, Namun teman-teman seperjuangannya masih terus melawan Belanda, seperti Gusti Matseman, Gusti Acil, Gusti Arsat, dan Antung Durakhman. Perlawanan kecil-kecilan terus berlangsung sampai abad ke dua puluh.

Pada abad ke-19, perlawanan terhadap Belanda juga terjadi di Kalimantan Barat walaupun tidak sebesar yang terjadi di daerah lain. Namun, cukup menjadi bukti bahwa perjuangan menentang penjajahan telah terjadi di seluruh tanah air. Di Kalimantan perlawanan terjadi antara lain di daerah Sintang dipimpin oleh Pangeran Ratu Kesuma Idris pada 1857. Ia ditangkap dan dibuang ke Karawang tetapi perjuangan diteruskan oleh kemenakannya, yaitu Pangeran Muda sampai ia meninggal pada 1860. Tokoh perlawanan lainnya ialah Abang Kadri (1869) dan Raden Paku (1896).

### 6. Perlawanan di Bali

dan Karang Asem mengadakan perjanjian dengan Belanda pada 1841 untuk dipaksa mengakui kedaulatan pemerintah Belanda di daerahnya masing-masing. Namun, perjanjian itu tidak dilaksanakan raja-raja Bali, mereka masih tetap merasa merdeka dan tetap menjalankan hukum *tawan karang*, yaitu hak raja untuk menguasai, merampas isi muatan kapal yang terdampar di pantai wilayah kerajaannya yang sangat ditentang Belanda.

Gusti Ketut Jelantik, Patih Kerajaan Buleleng, memimpin pasukan untuk menghadapi pasukan Belanda yang pada 1846 mengirimkan ekspedisi militernya ke daerah Buleleng. Peperangan segera berkobar dengan mendapat bantuan Raja Karang Asem. Serangan pertama itu gagal menundukkan Buleleng. Pertempuran sengit terjadi lagi pada 1848 di Jagaraga. Belanda gagal merebut benteng Jelantik di Jagaraga. Korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Ekspedisi ketiga pada 1849

dikirim dari Batavia. Ekspedisi ini membawa 4.177 pasukan, dilengkapi persenjataan yang kuat. Raja-Raja Bali mempersiapkan antara 10.000 sampai 20.000 orang prajurit. Akhirnya, Benteng Jagaraja dapat direbut Belanda melalui pertempuran besar dengan memakan banyak korban. Perlawanan rakyat Bali mulai surut, dan pada akhir abad ke-19 Bali baru dapat ditundukkan.

## 7. Perlawanan Rakyat Aceh (1873–1904)

Belanda mengadakan perjanjian dengan Sultan Siak yang berisi ketentuan bahwa Siak menyerahkan daerah-daerah Deli, Serdang, Langkat, dan Asahan kepada Belanda yang menyebabkan ketegangan antara Aceh dan Belanda pada 1858.

Inggris dan Belanda mengadakan perjanjian yang terkenal dengan nama *Traktat Sumatra 1871*. Isi traktat itu dirasakan mengancam Aceh yang isinya memberi kebebasan kepada Belanda untuk mengadakan perluasan di Sumatra, termasuk di daerah Aceh sehingga Kerajaan Aceh ini memperkuat diri. Pada 1873, Belanda mengirimkan pasukan lebih dari 3.000 prajurit yang dipimpin Jenderal J.H.R Kohler. Pertempuran berkobar di sekitar Masjid Raya dengan direbutnya masjid itu oleh Belanda Jenderal Kohler tewas tertembak di sekitar Mesjid Raya tersebut. Serangan tersebut gagal menundukkan Aceh. Muncul tokoh-tokoh terkemuka, seperti Panglima Polim, Teuku Imam Lueng Bata, Tengku Cik di Tiro, Teuku Umar, dan istrinya Cut Nyak Dien dalam perang ini.

Rakyat Aceh melawan Belanda dipimpin Panglima Polim. Perlawanan rakyat bergeser ke luar kota. Belanda menemui kesulitan untuk menundukkan rakyat Aceh yang disebabkan banyak faktor, di antaranya sistem ketatanegaraan Aceh yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Perlawanan rakyat tidak terpusat kepada figur sultan. Rakyat berjuang dengan semangat Perang Sabil yang terus menghebat. Tengku Cik di Tiro memimpin perlawanan di Pidie, Teuku Umar beserta istrinya Cut Nyak Dien berjuang di Aceh Barat.



Sumber: *Ensiklopedi Tema Dunia Islam Jilid 4, 2006*

Belanda mengirimkan Dr. Snouck Hurgronje untuk mengetahui rahasia kekuatan perjuangan rakyat Aceh. Ia datang di Aceh berpura-pura menjadi muslim yang taat sehingga diketahui bahwa sebenarnya Sultan Aceh tidak mempunyai kekuatan apa-apa tanpa persetujuan para kepala wilayah di bawahnya. Pengaruh ulama terhadap rakyat sangat besar. Pemerintah jajahan harus menggunakan taktik memecah belah kekuatan, kaum ulama harus dihadapi dengan kekuatan militer. Sementara itu, keluarga kaum bangsawan harus didekati. kepadanya diberikan peluang masuk ke dalam kelompok pamong praja di lingkungan pemerintah Belanda. Saran-saran inilah yang disampaikan Hurgronje kepada Belanda.

Teuku Umar berpura-pura menyerah kepada Belanda pada 1891 ketika Tengku Cik di Tiro meninggal. Ia diangkat dalam dinas ketentaraan dengan gelar *Teuku Umar Johan Pahlawan*. Akan tetapi, Teuku Umar keluar dari lingkungan

militer Belanda dan melanjutkan perjuangan melawan Belanda. Untuk memberi tekanan kepada pejuang Aceh, Kolonel J.B van Heutz mengerahkan kekuatannya sehingga Pidie dapat diduduki Belanda Panglima Polim menyingkir ke arah timur. Teuku Umar melakukan serangan balasan di Meulaboh pada 1899. Ia tertembak dan gugur.

Selain melaksanakan saran Snouck Hurgronje seperti termuat dalam bukunya "De Atjehers", Belanda juga melaksanakan tindakan-tindakan licik, yaitu menyandera keluarga Sultan dan para pejuang. Istri Sultan, istri-istri, anak-anak, dan ibu Panglima Polim diculik, dan memaksa Sultan dan Panglima Polim menyerah. Setelah perlawanan surut, Belanda memaksakan penandatanganan Perjanjian Singkat (*Korte Verklaring*) kepada kepala-kepala wilayah Aceh. Perlawanan baru terhenti pada awal abad ke-20.

## 8. Perlawanan Rakyat di Tanah Batak

Belanda melakukan ekspedisi perluasan daerah kekuasaan di jantung Tanah Batak pada pertengahan abad ke-19. Patuan Bosar Ompu Pulo Batu yang terkenal dengan nama Si Singamangaraja XII yang menggantikan Si Singamangaraja XI yang meninggal pada 1867. Si Singamangaraja XII mencari jalan damai dengan harapan Belanda tidak mengganggu kemerdekaan Tano Batak. Pendeta terkemuka bernama Ludwig von Nommensen menjadi perantara damai. Akan tetapi, tawaran damai tetap ditolak Belanda, yang akhirnya Si Singamangaraja XII mengadakan kampanye mengobarkan semangat perlawanan sehingga rakyat pun siap membantu pemimpinnya itu.

Belanda menerapkan taktik serangan ke pusat kedudukan Si Singamangaraja XII di Bakkara dengan dukungan pasukan kuat dipimpin oleh Letnan Kerchner, Letnat Schmidt, dan Letnan Roost van Limburg untuk menangkap Si Singamangaraja

XII hidup atau mati. Pertempuran besar terjadi sampai tahun 1889 di daerah Silindung, Humbang, dan Tobe Holbung (dimana terdapat Balige, Tambunan, Laguboti, dan Porseas). Si Singamangaraja mengambil sikap bertahan sejak 1900 karena banyak prajuritnya yang gugur dalam perang itu. Ia menyingkir ke daerah Pakrak-Pairi. Kedudukan Si Singamangaraja XII semakin terjepit pada 1904. Pasukan Letnan Kolonial van Dealen berusaha menyergapnya dari utara. Pasukan Marsose dipimpin oleh Kapten Hans Christoffel, bawahan van Dealen berhasil mengurung ruang gerak Si Singamangaraja XII. Belanda berhasil menawan istri serta anak-anak Raja Si Singamangaraja XII. Karena siasat liciknya itu memaksa Si Singamangaraja XII keluar dari tempat pertahanannya, pasukan Chritoffel menembak putri Si Singamangaraja XII yang bernama Lopian. Pada waktu itulah, ia keluar dari pertahanannya dan berhasil ditembak Belanda. Beliau gugur pada 17 Juni 1907. Satu per satu daerah yang masih merdeka berusaha mempertahankan kemerdekaannya ditundukkan Belanda dengan kekuatan militer.

## Bab II

# Pergerakan Nasional

### A. Organisasi Pergerakan

#### 1. Budi Utomo

BUDI UTOMO adalah organisasi pergerakan modern yang pertama di Indonesia dengan memiliki struktur organisasi pengurus tetap, anggota, tujuan, dan juga rencana kerja dengan aturan-aturan tertentu yang telah ditetapkan. Budi Utomo didirikan oleh mahasiswa STOVIA dengan pelopor pendirinya Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Sutomo pada 20 Mei 1908 yang bertujuan untuk memajukan bangsa Indonesia, meningkatkan martabat bangsa, dan membangkitkan kesadaran nasional. Pada 20 Mei 1908 biasa diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia.

Sebagai suatu organisasi yang baik, Budi Utomo memberikan usulan kepada pemerintah Hindia Belanda, yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatkan tingkat pengajaran di sekolah guru, baik guru Bumiputra maupun sekolah priyayi.
2. Memberi beasiswa bagi orang-orang Bumiputra.
3. Menyediakan lebih banyak tempat pada sekolah pertanian.
4. Izin pendirian sekolah desa untuk Budi Utomo.

5. Mengadakan sekolah VAK/ kejuruan untuk para Bumiputra dan para perempuan.
6. Memelihara tingkat pelajaran di sekolah-sekolah dokter Jawa.
7. Mendirikan TK/ Taman Kanak-Kanak untuk Bumiputra.
8. Memberikan kesempatan kepada Bumiputra untuk mengenyam bangku pendidikan di sekolah rendah Eropa atau sekolah Tionghoa-Belanda.

Kongres pertama Budi Utomo diadakan di Yogyakarta pada Oktober 1908 untuk mengonsolidasikan diri dengan membuat keputusan sebagai berikut.

1. Tidak mengadakan kegiatan politik.
2. Bidang utama adalah pendidikan dan kebudayaan.
3. Terbatas wilayah Jawa dan Madura.
4. Mengangkat R.T.Tirtokusumo yang menjabat sebagai Bupati Karanganyar sebagai ketua.

Pemerintah Hindia Belanda mengesahkan Budi Utomo sebagai badan hukum yang sah karena dinilai tidak membahayakan, namun tujuan organisasi Budi Utomo tidak maksimal karena banyak hal, yakni sebagai berikut.

1. Mengalami kesulitan finansial.
2. Keluarga R.T. Tirtokusumo lebih memperhatikan kepentingan pemerintah Kolonial daripada rakyat.
3. Lebih memajukan pendidikan kaum priyayi daripada rakyat jelata.
4. Keluarga anggota dari golongan mahasiswa dan pelajar.
5. Bupati-bupati lebih suka mendirikan organisasi masing masing.

6. Bahasa Belanda lebih menjadi prioritas dibandingkan dengan bahasa Indonesia.
7. Pengaruh golongan priyayi yang mementingkan jabatan lebih kuat dibandingkan yang nasionalis.

Para pengurus organisasi Budi Utomo dalam menjalankan organisasinya sepakat untuk menjalankan misi organisasi ini hanya dalam pendidikan dan budaya, serta tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan politik. Namun, perkembangan pendidikan yang dijalankan oleh Budi Utomo ternyata tidak sesuai dengan keinginan para anggota Budi Utomo. Organisasi ini dalam menjalankan misi pendidikannya cenderung memajukan pendidikan dari kaum priyayi daripada penduduk pribumi atau masyarakat pada umumnya. Selain itu, dalam pelaksanaan sebelum kongres perjuangan Budi Utomo hanya untuk orang Jawa, tidak untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, mulai tampak adanya kemunduran dalam organisasi ini. Hal ini terlihat dengan adanya rasa kekecewaan dari para anggota STOVIA dan para pemuda lainnya terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Budi Utomo.

Dengan munculnya organisasi-organisasi lain di Indonesia yang memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia, maka Budi Utomo mulai mengalami kemunduran. Namun, suatu hal yang penting dari Budi Utomo adalah bahwa di dalam tubuhnya telah muncul benih-benih semangat nasionalisme yang pertama. Karena itulah Budi Utomo dipandang sebagai induk pergerakan nasional. Untuk itu, sebagai penghormatan hari kelahiran Budi Utomo, yaitu pada 20 Mei 1908 dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

## 2. Serikat Islam (SI)

Revolusi Nasional Cina yang dipelopori oleh dr. Sun Yat Sen pada 10 Oktober 1911 telah berpengaruh terhadap orang-orang Cina perantauan di Indonesia. Mereka segera mendirikan

ikatan-ikatan yang bercorak nasionalis Cina. Kedudukan mereka di bidang ekonomi sangat kuat. Mereka menguasai penjualan bahan-bahan batik. Para pedagang batik pribumi merasa terdesak atau dirugikan. Untuk menghadapi para pedagang Cina itu, pada 1911, para pedagang batik Solo di bawah pimpinan H. Samanhudi mendirikan Serikat Islam (SI). Tujuan berdirinya Serikat Islam, yaitu:

- a. memajukan perdagangan;
- b. melawan monopoli pedagang Tionghoa;
- c. memajukan agama Islam, Serikat Islam mengalami perkembangan pesat karena bersifat nasionalis, religius, dan ekonomis.

Serikat Islam (SI) merupakan organisasi yang dapat menyentuh pada rakyat lapisan paling bawah kecil yang selama itu mendapatkan penderitaan, serta tidak pernah tersentuh oleh organisasi pergerakan yang ada di Indonesia. Dalam memperjuangkan masalah ketatanegaraan, Serikat Islam selalu memperjuangkannya dengan gigih padahal, jika dilihat dari tujuan berdirinya sangat jauh berbeda. Aksi yang dilakukan oleh Serikat Islam dipandang sebagai tindakan revolusioner dalam menghadapi dan melawan tindakan yang dilakukan oleh para penjajah.

Dalam menghadapi Serikat Islam yang revolusioner, pemerintah Hindia Belanda sangat hati-hati mengambil tindakan. Untuk itu, pemerintah Belanda mengambil kebijakan yang diberikan pada Serikat Islam, yaitu Serikat Islam tidak boleh berupa organisasi yang mempunyai pengurus besar dan hanya diperbolehkan berdiri secara lokal. Oleh sebab itu, pada 1915, dibentuklah apa yang disebut dengan Centra Serikat Islam (CSI) yang akan mengoordinasikan dan mengontrol semua Serikat Islam lokal yang ada.

Dengan jalan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada organisasi Serikat Islam, unsur untuk memberontak yang dilakukan organisasi ini lambat laun berkurang. Menurut D.M.G. Koch, adanya tiga aliran dalam tubuh Serikat Islam (SI), yaitu yang bersifat Islam fanatik, yang bersifat menentang keras, dan yang hendak berusaha mencari kemajuan secara berangsur-angsur dengan bantuan pemerintah. Beberapa aspek perjuangan yang terkumpul menjadi satu dalam tubuh Serikat Islam. Tokoh-tokoh penggerak Serikat Islam yang terkenal, di antaranya Haji Oemar Said Tjokroaminoto, Haji Agus Salim, dan Suryopranoto.

Akibat adanya perpecahan dalam tubuh organisasi, Serikat Islam mengalami kemunduran. Kemunduran ini diakibatkan adanya pengaruh Marx/komunis dalam pemikiran para pemimpin yang berhaluan kiri. Sementara itu, para pemimpin yang lain tetap pemikirannya mengenai Islam. Akhirnya, pada 1921 Serikat Islam terpecah, yakni ada golongan kiri atau disebut Serikat Islam Merah yang memisahkan diri dari Serikat Islam. Dengan adanya perpecahan tersebut sebetulnya merugikan Serikat Islam itu sendiri, namun karena pemikiran yang berbeda dalam sebuah organisasi akhirnya terpecah juga. Kemudian, Serikat Islam berubah nama menjadi Partai Serikat Islam Indonesia (PSII). Setelah H.O.S Tjokroaminoto meninggal, yaitu sekitar 1930, Serikat Islam mengalami perpecahan sehingga peranan dan pengaruhnya menjadi menurun.

### 3. • Indische Partij (IP)

Seiring dengan perkembangan zaman pada saat itu, yaitu sebagai fase dari perkembangan sejarah pergerakan nasional, maka tumbuhnya sebuah organisasi yang bergerak dalam politik yang meliputi pengertian nasionalisme modern dan sebagai organisasi pendukung gagasan revolusioner nasional pada saat itu. Organisasi itu adalah *Indische Partij* yang didirikan di Bandung pada 25 Desember 1912. Pendirinya

ialah dr. E.F.E Douwes Dekker, dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. *Indische Partij* bertujuan mempersatukan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Tokoh-tokoh *Indische Partij* menyebarluaskan tujuannya melalui surat kabar. Dalam waktu singkat, *Indische Partij* mempunyai banyak anggota. Cabang-cabangnya tersebar di seluruh Indonesia.



Sumber: *Ensiklopedi Tema Dunia Islam Jilid 4, 2006*

Organisasi ini berpijak pada asas nasionalisme yang mempunyai cita-cita bangsa Indonesia merdeka. *Indische Partij* berdiri atas dasar nasionalisme yang luas menuju kemerdekaan Indonesia sebagai "National Home" semua keturunan Bumiputra, Belanda, Cina Arab, dan sebagainya, yang mengakui Hindia sebagai tanah air dan kebangsaannya. Semangat organisasi ini memunculkan sebuah paham yang disebut dengan *Indische Nasionalisme*. *Indische Partij* terkenal dengan perjuangannya yang tegas sehingga organisasi ini merupakan partai politik yang pertama berdiri di Indonesia.

Douwes Dekker menyatakan bahwa *Indische Partij* merupakan partai yang radikal. Berdirinya organisasi ini merupakan penentangan perang dari pihak budak kolonial yang membayar *belasting* kepada kerajaan penjajah pemungut pajak.

Tujuan dari *Indische Partij* adalah membangunkan patriotisme semua "indiers" terhadap tanah air, yang telah memberikan lapangan hidup kepada mereka, agar mereka mendapat dorongan untuk bekerja sama atas dasar persamaan ketatanegaraan untuk memajukan tanah air "Hindia" dan untuk mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka".

Sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah Belanda sangat berbeda terhadap Budi Utomo dan Serikat Islam, pada *Indische Partij*, pemerintah Hindia Belanda sangat tegas. Permohonan yang dilakukan oleh *Indische Partij* kepada Gubernur Jenderal untuk mendapatkan permohonan sebagai pengakuan badan hukum ditolak oleh pemerintah Belanda, dengan alasan karena organisasi ini berdasarkan politik dan mengancam keamanan umum, dan *Indische Partij* dianggap partai terlarang.

Sehubungan dengan pemerintah Belanda akan merayakan 100 tahun kemerdekaannya dari jajahan Prancis, salah seorang pendiri *Indische Partij*, yaitu Suryadi Suryaningrat (kelak dikenal dengan Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan) menulis sebuah risalah yang berjudul "*Als ik een Nederlander was...*" ("Andai Saya Orang Belanda"), yang isinya merupakan sindiran tajam atas ketidakpastian di daerah jajahan. Belanda merasa tersinggung dan karena dianggap membahayakan, maka para pemimpin *Indische Partij*, yaitu Douwes Dekker, Suwardi Suryaningrat, dan dr. Tjipto Mangunkusumo pada Agustus 1913 mendapatkan hukuman buangan dan ketiga pemimpin ini memilih negeri Belanda sebagai tempat buangan.

Dengan kepergian ke tempat pembuangan sebagai hukuman, yaitu ke negeri Belanda, membawa pengaruh terhadap keanggotaan *Indische Partij* yang semakin lama semakin mundur.

Indische Partiji kemudian berganti nama menjadi *Partai Insulinde*, namun tidak pernah mempunyai pengaruh terhadap rakyat sehingga Partai Insulinde semakin lemah. Sekalipun Douwes Dekker kembali dari Belanda pada 1918, tetap tidak begitu berarti sehingga Partai *Insulinde* berganti nama menjadi *National Indsiche Partij* (NIP). Partai ini tidak mempunyai pengaruh kepada rakyat, dan akhirnya partai ini hanya merupakan kumpulan orang-orang terpelajar.

#### 4. Gerakan Pemuda

Dalam sejarah pergerakan, sebenarnya gerakan pemuda telah dimulai pada 20 Mei 1908 yang dipelopori oleh Budi Utomo. Dalam perkembangannya, pergerakan ini banyak didukung oleh kaum tua. Cita-cita untuk melangsungkan pergerakan nasional di tanah Jawa muncul dari M. Wahidin Sudiro Husodo, seorang dokter. Perkumpulan ini dalam gerakannya terlihatnya masih didominasi oleh kaum tua. Sebagian besar dari anggota perkumpulan terdiri atas *ambtenaar-ambtenaar* dari golongan bangsawan. Namun, satu hal yang membuktikan bahwa dalam perkumpulan mulai tumbuh nasionalisme adalah dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia.

Lama-kelamaan golongan muda merasa tidak puas dengan perkumpulan tua yang ada di Budi Utomo. Akhirnya, pada 7 Maret 1915, dr. R. Satriman Wiryosandjoyo, Kadarman, dan Sunardi serta pemuda lainnya mendirikan perkumpulan pemuda, namun yang diterima sebagai anggota hanya anak-anak sekolah menengah yang berasal dari Pulau Jawa dan Madura. Perkumpulan tersebut diberi nama *Tri Koro Dharmo* (tiga tujuan mulia, yaitu sakti, budhi, bakti) merupakan perkumpulan pemuda yang pertama di Indonesia. Tujuan perkumpulan ini adalah mencapai Jawa Raya dengan jalan memperkokoh rasa persatuan antara pemuda di Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok.

Pekumpulan Tri Koro Dharmo memiliki tiga asas, yakni

1. menimbulkan pertalian antarmurid Bumiputra di sekolah menengah, dan kursus perguruan kejuruan dan sekolah vak;
2. menambah pengetahuan umum bagi anggota-anggotanya;
3. membangkitkan dan mempertajam perasaan buat segala bahasa dan budaya Indonesia.

Namun, pada pelaksanaannya perkumpulan masih bersifat kedaerahan, yaitu Jawa-sentris. Untuk menghindari perpecahan pada perkumpulan ini, diadakanlah kongres yang dilangsungkan di Solo pada 1918 berubah nama menjadi *Jong Java*. Tujuan dari Jong Java sesuai dengan anggaran dasar adalah mendidik para anggota supaya kelak dapat memberikan tenaganya untuk pembangunan Jawa Raya dengan jalan mempercepat persatuan, menambah pengetahuan anggota, serta berusaha menimbulkan rasa cinta akan budaya sendiri.

Pada 1922, Jong Java menetapkan bahwa tidak akan mencampuri urusan politik sehingga anggota-anggotanya dilarang menjalankan politik atau menjadi perkumpulan politik. Namun, pada kongres ke-7 akibat dari perkembangan gerakan politik yang menyeret Jong Java berpolitik akhirnya diusulkan supaya Jong Java dijadikan sebuah perkumpulan politik serta memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk berpolitik. Dengan adanya perbedaan di kalangan anggota Jong Java, akhirnya mereka yang setuju Jong Java dijadikan sebagai perkumpulan politik, mendirikan *Jong Islamieten Bond* dengan Islam sebagai dasar perjuangan. Untuk menggalang persatuan dan kesatuan, di antara para pemuda Islam dibentuklah Pemuda Muslim Indonesia.

Dengan munculnya Jong Java sebagai perkumpulan pemuda, maka bermunculanlah kumpulan pemuda lainnya

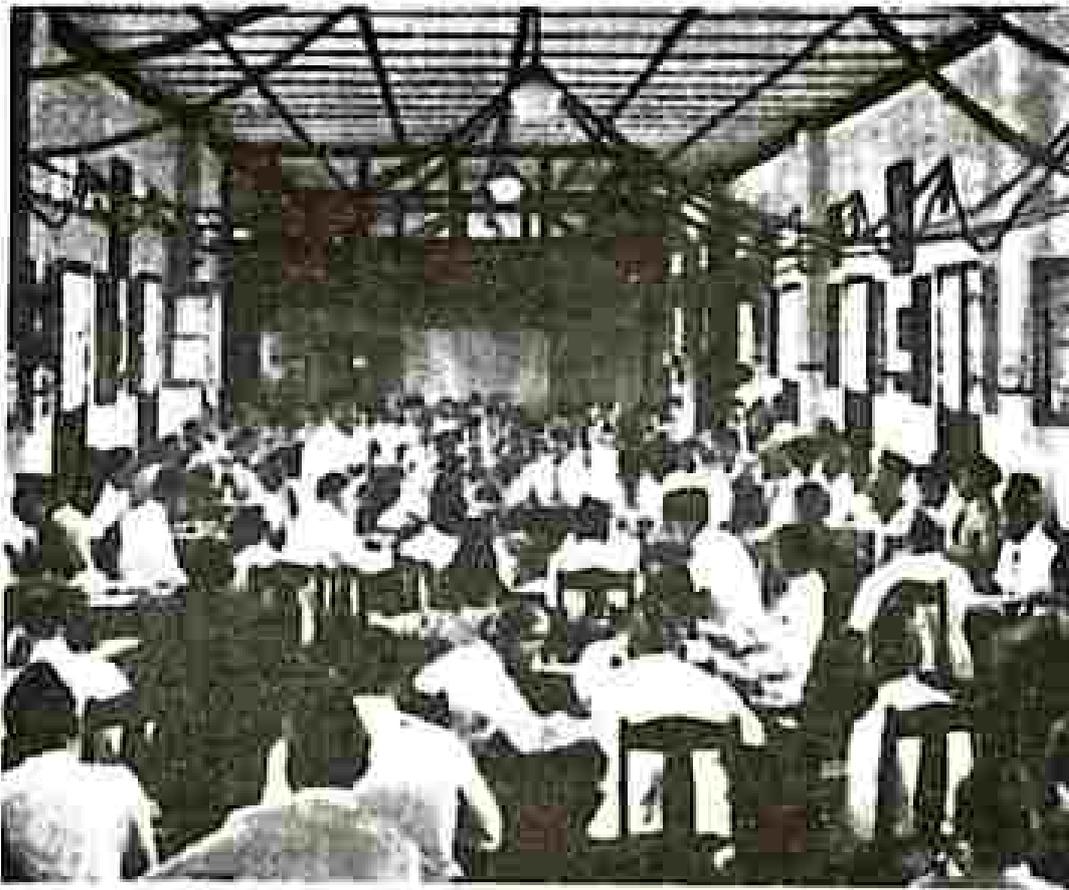
yang berdasarkan kedaerahan, seperti Jong Sumatranen Bond, Pasundan, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Ambon, Jong Celebes (Sulawesi), Timorees Verbond, dan lain-lain. Semua perkumpulan pemuda itu bertujuan untuk memajukan Indonesia. Munculnya beberapa perkumpulan pemuda memperlihatkan benih-benih yang akan memajukan bangsa Indonesia ke arah persatuan. Oleh karena itu, para pemuda merasa perlu adanya persatuan di kalangan pemuda-pemuda hingga terbentuk suatu wadah kepemudaan.

Pada 30 April—2 Mei 1926, di Kota Jakarta, para pemuda mengadakan Kongres Pemuda I. Tujuan kongres adalah menanamkan semangat kerja sama antarperkumpulan pemuda di Indonesia untuk menjadi dasar bagi persatuan Indonesia. Kongres ini dilantik oleh Jong Indonesia Komite di bawah pimpinan Tabrani. Pada kongres diajukan usulan oleh PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia) untuk menggabungkan segala perkumpulan pemuda dalam salah satu badan perhimpunan massa muda Indonesia. Namun, usaha itu tidak dapat dilaksanakan karena rasa kedaerahan masih sangat kental.

Pada 15 Agustus 1926 diadakan suatu konferensi yang diadakan oleh Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Sekar Rukun, Jong Islamieten Bond, Jong Batak, dan Kongres Komite. Dalam konferensi ini diusulkan agar mendirikan badan permanen untuk keperluan persatuan Indonesia. Semua perkumpulan setuju akan usulan tersebut, kecuali Jong Islamieten Bond tidak setuju. Setelah mengadakan konferensi tersebut, akhirnya pada 31 Agustus 1926, diusahakanlah anggaran dasar perkumpulan tersebut dengan nama Jong Indonesia. Tujuannya adalah menanamkan dan mewujudkan cita-cita Persatuan Indonesia dengan dasar nasionalisme menuju ke arah Indonesia Raya.

Kongres Pemuda II diadakan kembali atas inisiatif PPPI yang dilaksanakan pada 27–28 Oktober 1928. Tujuannya untuk mempersatukan segala perkumpulan pemuda Indonesia

yang ada dalam satu badan gabungan. Kongres menghasilkan Sumpah Pemuda. Isi dari Sumpah Pemuda adalah tiga sendi persatuan Indonesia, yaitu persatuan tanah air, bangsa, dan bahasa. Selain itu, pada kongres ini juga diperkenalkan lagu *Indonesia Raya* yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia, dan bendera Merah Putih sebagai bendera Pusaka bangsa Indonesia.



Sumber: *Ensiklopedi Tema Dunia Islam Jilid 4*, 2006

Tekanan dan larangan dari pemerintah terhadap perhimpunan pemuda, seperti sukar mendapatkan pekerjaan dan larangan untuk sekolah, menyebabkan banyak para pemuda yang keluar dari organisasi. Dampaknya rasa tidak puas terhadap pemerintah semakin luas. Dengan keadaan tersebut, bermunculanlah organisasi pemuda yang bersikap radikal, seperti organisasi Suluh Pemuda Indonesia dan Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia. Dengan banyaknya organisasi radikal dan militan menyebabkan situasi yang menghebohkan. Dengan kejadian tersebut, akhirnya Indonesia

Muda berinisiatif untuk mengadakan kongres pada 1936, namun tidak mendapatkan izin dari pemerintah. Akan tetapi, karena keadaan terus mendesak untuk mengadakan kongres, akhirnya pada 1938 Kongres Pemuda III diadakan di Yogyakarta. Hasilnya adalah federasi organisasi-organisasi pemuda dengan pusat di Jakarta. Dalam kongres diputuskan mengenai kata Kemerdekaan Nusa dan Bangsa diganti menjadi menjunjung Nusa dan Bangsa.

Di samping munculnya organisasi pemuda yang bersifat nasionalis, juga muncul organisasi pemuda yang berdasarkan keagamaan, misalnya adanya Anshor Nahdatul Ulama, Pemuda Muhammadiyah, Persatuan Pemuda Kristen, dan Persatuan Pemuda Katolik. Gerakan pemuda tidak terbatas dalam negeri saja, tetapi di luar negeri terutama di Benua Eropa dan negara-negara Arab. Namun, yang paling menonjol adalah perhimpunan Indonesia yang berpusat di Belanda, banyak melahirkan pemimpin bangsa di kemudian hari. Perhimpunan pemuda ini gerakannya ke arah politik, terutama ketika dipimpin oleh Muhammad Hatta dan A. Subardjo.

### 5. Partai Nasional Indonesia (PNI)

Partai Nasional Indonesia (PNI) berasal dari perkumpulan yang didirikan oleh Ir. Soekarno, yaitu *Algemeene Studieclub* (ASC) yang berdiri 1925. Dalam kongres PNI yang dilaksanakan di Surabaya, Ir. Soekarno terpilih sebagai ketua pengurus besar PNI. Cita-cita PNI untuk menggalang persatuan bukan hanya mempengaruhi organisasi-organisasi politik lainnya, melainkan berpengaruh positif terhadap perkumpulan pemuda yang lain. Tujuan dari PNI adalah kemerdekaan Indonesia serta dalam pencapaiannya ialah dengan nonkooperatif. PNI merupakan partai politik besar pertama yang keanggotaannya tidak membedakan suku, bangsa, dan agama. Sikap PNI terhadap agama sangat netral. Maksudnya, karena Indonesia beragam suku, bangsa, dan agama maka tidak dibeda-bedakan dalam

mendapatkan perlakuan. Agama tidaklah menjadi dasar perjuangan, tetapi tetap agama harus dihormati. Dengan memiliki sikap yang demikian, para pemimpin di PNI terkenal dengan nasional agama.

Dengan sukses menggalang massa, PNI mulai dicurigai oleh pemerintah Kolonial Belanda. Akibatnya, pemerintah mengeluarkan larangan bagi polisi, tentara, dan pegawai menjadi anggota PNI. Akhirnya, karena ada desas-desus PNI akan memberontak, pemerintah Kolonial Belanda menangkap para pemimpin PNI. Di antara yang ditangkap adalah empat tokoh terkemuka PNI, yaitu Ir. Soekarno (ketua), R. Gatot Mangkoepradja (sekretaris II pengurus besar), Maskoen Soemadiredja (sekretaris cabang Bandung), dan Soepriadinata (anggota cabang Bandung). Dengan penangkapan tersebut, semua tokoh pergerakan mengadakan perlawanan terhadap Belanda dan melakukan protes karena keempat tokoh tersebut diajukan ke pengadilan. Dalam pidato pembelaannya (*pledoi*) yang dikenal dengan *Indonesia Menggugat*, Ir Soekarno menegaskan bahwa pergerakan nasional Indonesia adalah reaksi umum yang wajar dari rakyat jajahan yang menghendaki kemerdekaan. Revolusi Indonesia adalah bagian dari revolusi dunia yang terbelakang dan diperbodoh oleh penjajah. Namun, walaupun dengan pembelaan tersebut tetap saja para pemimpin PNI dijatuhi hukuman pada Desember 1930.

Dengan adanya hukuman tersebut merupakan pukulan terberat bagi PNI, karena tokoh-tokoh penting sebagai penggerak PNI ditahan. Untuk itu, PNI mulai mengalami kemunduran dan pada April 1911 PNI dibubarkan atas kata sepakat pada kongres luar biasa yang diadakan di Jakarta. Dengan adanya pembubaran tersebut, otomatis menimbulkan pro dan kontra dari para anggotanya. Pihak yang pro pembubaran melanjutkan mendirikan Partindo (Partai Indonesia) yang dipimpin oleh Mr. Sartono,

sedangkan yang kontra pembubaran mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Drs. Muhammad Hatta dan Sutan Sjahrir. PNI baru menekankan pendidikan kepada kader-kader politik tanpa melihat jumlah anggota, sedangkan Partindo mencoba melanjutkan cita-cita PNI lama dan menjadikan Partindo merupakan organisasi massa yang tujuannya menggalang kekuatan untuk kemerdekaan-Indonesia. Kedua organisasi itu tidak banyak berhasil dalam usahanya karena politik yang sangat kolot dan keras dari Gubernur Jenderal de Jonge. Di samping itu, pemimpinnya kemudian ditangkap dan dibuang ke luar Jawa.

## 6. Fraksi Nasional

Pembentukan Fraksi Nasional di dalam *Volksraad* (Dewan Perwakilan Rakyat masa pemerintahan kolonial) muncul dari anggota *Volksraad*, Moh. Husni Thamrin, yang merupakan ketua perkumpulan Kaum Betawi dan beranggotakan wakil-wakil daerah-daerah Jawa, Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan didirikan pada 27 Januari 1930 di Jakarta. Fraksi Nasional mempunyai tujuan untuk menjamin adanya kemerdekaan nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan cara:

1. mengusahakan perubahan-perubahan ketatanegaraan;
2. berusaha menghapuskan perbedaan-perbedaan politik, ekonomi, dan intelektual sebagai *antithese* kolonial;
3. mengusahakan kedua hal tersebut dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum.

Kegiatan pertama yang dilakukan Fraksi Nasional adalah pembelaan terhadap para pemimpin PNI yang ditangkap di dalam sidang-sidang *Volksraad*. Fraksi Nasional tidak setuju terhadap penggeledahan yang dilakukan terhadap pemimpin PNI oleh pemerintah kolonial. Hal ini menimbulkan pergerakan dari rakyat.

Di bawah tekanan politik Gubernur Jenderal de Jonge, politik nonkooperatif menjadi lumpuh, akibatnya muncul kaum koperator yang di dalam *Volksraad* oleh Fraksi Nasional dan di luar *Volksraad* oleh Partai Indonesai Raya (Parindra) yang didirikan pada 1935. Pada saat itu, muncullah yang dinamakan Petisi Soetardjo yang berisikan usulan tentang Indonesia berdiri sendiri, tetapi tidak lepas dari kerja sama dengan Belanda. Dengan munculnya petisi tersebut, membuat pro dan kontra di kalangan para pergerakan, karena dengan munculnya petisi tersebut suara Fraksi Nasional terpecah-pecah.

## 7. Petisi Soetardjo

Sebuah petisi yang diajukan oleh Soetardjo Kartohadkoesoemo, pada 15 Juli 1936, kepada Ratu Wilhelmina serta *Staten Generaal* (parlemen) di negeri Belanda. Petisi ini diajukan karena makin meningkatnya perasaan tidak puas di kalangan rakyat terhadap pemerintahan akibat kebijaksanaan politik yang dijalankan Gubernur Jenderal de Jonge. Petisi ini ditandatangani juga oleh I.J. Kasimo, G.S.S.J. Ratulangi, Datuk Tumenggung, dan Ko Kwat Tiong.

Isi petisi adalah permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah, antara wakil-wakil Indonesia dan negeri Belanda, dimana anggota-anggotanya mempunyai hak yang sama. Tujuannya untuk menyusun suatu rencana yang isinya adalah pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yang berdiri sendiri (otonomi) dalam batas Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda. Pelaksanaannya akan berangsur-angsur dijalankan dalam waktu sepuluh tahun atau dalam waktu yang akan ditetapkan oleh sidang permusyawaratan.

Usul yang dianggap menyimpang dari cita-cita kalangan pergerakan nasional ini mendapat reaksi, baik dari pihak Indonesia maupun pihak Belanda. *Pers Belanda*, seperti *Preanger Bode*, *Java Bode*, *Bataviaasch Nieuwsblad*, menuduh usul petisi

sebagai suatu "permainan yang berbahaya", revolusioner, belum waktunya dan tidak sesuai dengan keadaan.

Golongan reaksioner Belanda, seperti *Vaderlandsche Club* berpendapat Indonesia belum matang untuk berdiri sendiri. Akan tetapi, ada juga orang-orang Belanda dari kalangan pemerintah yang menyetujui petisi, dengan mengirim surat kepada Soetardjo. Pihak pemerintah Hindia Belanda sendiri menyatakan bahwa pemerintah memang mempunyai maksud untuk selalu meningkatkan peranan rakyat dalam mengendalikan pemerintahan sampai rakyat Indonesia sanggup untuk mengurus segala sesuatunya. Dari pihak Indonesia, baik di dalam maupun di luar *Volksraad* reaksi terhadap usul petisi juga bermacam-macam.

Beberapa anggota *Volksraad* berpendapat bahwa usul petisi kurang jelas, kurang lengkap, dan tidak mempunyai kekuatan. Pers Indonesia seperti surat kabar *Pemandangan*, *Tjahaja Timoer*, *Pelita Andalas*, *Pewartu Deli*, majalah *Soeara Katholiek* menyokong usul petisi. Oleh karena itu, usul petisi dengan cepat tersebar luas di kalangan rakyat dan sebelum sidang *Volksraad* membicarakan secara khusus, kebanyakan pers Indonesia menyokong usul ini. Menurut harian *Pemandangan*, saat usul ini dimajukan sangat terlambat, yaitu saat akan digantikannya Gubernur Jenderal de Jonge oleh Gubernur Jenderal Tjarda.

Kemudian diputuskan untuk membicarakan usul petisi tersebut dalam sidang khusus 17 September 1936. Pada 29 September 1936 selesai sidang perdebatan, diadakalah pemungutan suara dimana petisi disetujui oleh *Volksraad* dengan perbandingan suara 26 suara setuju lawan 20 suara menolak. Pada 1 Oktober 1936, petisi yang telah menjadi petisi *Volksraad* itu dikirim kepada Ratu, Staten General, dan Menteri Koloni di negeri Belanda. Sementara menunggu

keputusan diterima atau tidak usul petisi tersebut maka untuk memperkuat dan memperjelas maksud petisi, pada persidangan *Volksraad* Juli 1937 Soetardjo kembali mengajukan usul rencana Indonesia menuju "Indonesia berdiri sendiri".

Rencana tersebut dibagi dalam dua tahap, masing-masing untuk lima tahun. Atas usul tersebut wakil pemerintah Hindia Belanda dalam sidang *Volksraad* menjawab bahwa pemerintah juga mempunyai perhatian ke arah perbaikan pemerintahan Indonesia, tetapi karena usul itu amat luas sekali maka penyelesaiannya berada di tangan pemerintah di negeri Belanda dan Staten General.

Petisi ini kembali banyak menimbulkan tanggapan dari organisasi-organisasi gerakan rakyat, seperti Perhimpunan Indonesia (PI), Rukun Pelajar Indonesia (Rupi), Gerakan Rakjat Indonesia (GERINDO), Perkumpulan Katolik di Indonesia (PPKI), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), PNI, dan sebagainya.

Pada persidangan *Volksraad* Juli 1938, Gubernur Jenderal Tjarda secara samar-samar telah membayangkan bahwa petisi akan ditolak. Laporan Gubernur Jenderal kepada menteri jajahan (berdasarkan laporan-laporan, antara lain dari *Raad van Nederland-Indie, Adviseur voor Inlandse Zaken, Directeur van Onderwijs en Eredienst*), telah menyarankan supaya petisi ditolak dengan alasan isi kurang jelas. Hal ini juga mengingat ketidakpastian akan kejadian-kejadian di masa yang akan datang, maka tidak dapatlah disetujui keinginan untuk mengadakan konferensi untuk menyusun rencana bagi masa yang akan datang. Akhirnya, ia menyarankan bahwa biar bagaimanapun petisi harus ditolak sehingga perubahan secara prinsip bagi kadudukan Indonesia dan mengadakan konferensi itu tidak perlu diadakan.

Akhirnya dengan keputusan Kerajaan Belanda No. 40 14 November 1938, petisi yang diajukan atas nama *Volksraad* ditolak oleh Ratu Wilhelmina. Alasan penolakannya, antara lain bahwa bangsa Indonesia belum matang untuk memikul tanggung jawab memerintah diri sendiri.

Petisi Soetardjo dianggap oleh para kalangan pergerakan telah melanggar cita-cita dari pergerakan, dan mendapat reaksi keras, baik dari pihak Belanda maupun dari pihak bangsa Indonesia. Dalam hal ini ada yang pro dan ada yang kontra terhadap petisi Soetardjo. Pers dari Belanda sangat tidak setuju akan petisi yang diajukan oleh Soetardjo karena dianggap petisi ini sebagai "permainan yang berbahaya", revolusioner. Golongan reaksi Belanda seperti *vaderlandsche Club*, berpendapat Indonesia belum matang untuk berdiri sendiri, tetapi ada juga bangsa Belanda yang mendukung, yaitu dari kalangan pemerintah menyetujui isi dari petisi tersebut. Pihak pemerintah Belanda sendiri menyatakan bahwa pemerintah memang mempunyai maksud untuk selalu meningkatkan peranan rakyat dalam mengendalikan pemerintahan sampai rakyat Indonesia dianggap sanggup untuk mengurus segalanya.

Sementara dari kalangan *Volksraad* Indonesia, usulan dari Soetardjo itu belum jelas, kurang lengkap, dan belum mempunyai kekuatan. Akan tetapi, tidak sedikit dari pers yang menyokong petisi ini. Pers Indonesia yang menyokong isi dari petisi ini, antara lain *Pemandangan*, *Tjahaja Timoer*, *Pelita Andalas*, dan lain-lain. Mereka menyatakan bahwa usul tersebut sangat tepat, yaitu saat akan digantinya Gubernur Jenderal de Jonge oleh Gubernur Jenderal Tjarda yang menurut pendapat waktu itu ia berpaham Liberal. Dengan banyaknya pers yang menyokong akan petisi tersebut, maka berita mengenai petisi tersebut cepat tersebar di seluruh rakyat.

Tanpa pemilihan suara dalam sidang *Volksraad*, petisi Soetardjo diterima untuk dibicarakan dalam sidang khusus. Dalam perdebatan yang dilakukan dalam *Volksraad* di samping kelompok pengusul, terdapat tiga kelompok yang berpendapat sendiri. Dalam membela usul Soetardjo, mereka mengatakan keadaan dalam negeri sebenarnya bukanlah masalah primer tetapi skunder, masalah yang paling pokok adalah hubungan kerajaan antara negeri Belanda dan Indonesia. Untuk itu, Indonesia harus berdiri sendiri sehingga dapat berkembang ke arah yang lebih maju. Selain itu, ada permasalahan yang bersifat internasional dan yang menjadi kepentingan bersama tetapi diurus oleh kerajaan.

Pada persidangan *Volksraad* Juli 1937, Soetardjo kembali mengajukan usul rencana yang sebaiknya dijalankan oleh pemerintah Belanda dalam usaha menuju Indonesia berdiri sendiri. Rencana-rencana tersebut dibagi dalam tahapan. Atas usul tersebut, perwakilan dari pemerintah Hindia Belanda dalam sidang *Volksraad* menjawab bahwa pemerintah juga mempunyai perhatian ke arah perbaikan pemerintahan Indonesia. Sementara di negara Belanda, petisi juga dipropagandakan oleh Perhimpunan Indonesia dengan cara membagikan brosur-brosur dalam rangka menyokong petisi tersebut. Atas sokongan itu, Perhimpunan Indonesia mendapat tuduhan dari majalah *Toejoen Rakyat* bahwa Perhimpunan Indonesia telah menyalahi anggaran dasarnya. Sementara itu, dengan sokongannya pada petisi Soetardjo, perhimpunan Indonesia menjelaskan bahwa untuk menghadapi fasisme terhadap negeri Belanda dan Indonesia, maka dipandang perlu untuk memperbaiki hubungan yang telah ada antara kedua belah pihak. Tujuannya agar pemerintah Belanda memenuhi maksud yang terkandung dalam petisi, yaitu mengadakan suatu konferensi antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda.

## 8. Gabungan Politik Indonesia (GAPI)

Pada 1939, dibentuk suatu gagasan yang tujuannya menggabungkan partai-partai politik serta untuk membina kerja sama antarpantai. Husni Thamrin ialah salah seorang tokoh yang mendirikan federasi itu menyatakan bahwa pembentukan federasi pada mulanya dianjurkan oleh PSII, yaitu dengan nama Badan Pembentukan Perantara Partai. Pada 21 Mei 1939, rapat pendirian konsentrasi nasional di Jakarta berhasil didirikan suatu organisasi yang merupakan kerja sama antara partai-partai politik dan organisasi-organisasi dengan diberi nama Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Dalam gabungan ini partai-partai memiliki kebebasan penuh bertahap pada pelaksanaan program kerja partainya masing-masing. Apabila dalam partainya terdapat suatu perselisihan, maka GAPI menjadi penengah dalam menangani perselisihan tersebut. Para pemimpin yang hadir pada saat pembentukan GAPI, di antaranya Muhammad Husni Thamrin, Mr. Amir Sjarifuddin, Abikusno, dan Tjokrosuyoso.

Untuk memperlancar dan mempermudah mengelola Gabungan Politik Indonesia, maka dibentuklah suatu anggaran dasar yang tujuannya memberikan penjelasan terhadap para anggota GAPI. Anggaran dasar tersebut di antaranya:

- a. hak untuk menentukan diri sendiri;
- b. persatuan nasional dari seluruh bangsa Indonesia dengan berdasarkan kerakyatan dan paham politik, ekonomi, dan sosial;
- c. persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia.

Dalam memuluskan pembentukan GAPI perlu adanya persamaan persepsi di antara para anggota GAPI. Pada 1939, GAPI mengadakan kongres yang pertama. Semboyan dari kongres pertama ini adalah "Indonesia Berparlemen."

Dengan terjadinya perang II, yaitu penyerbuan yang dilakukan oleh Jerman terhadap Polandia, maka GAPI mengeluarkan suatu pernyataan yang kemudian dikenal dengan sebutan *Manifest GAPI*. Isi pernyataan tersebut adalah mengajak seluruh rakyat Indonesia dan negeri Belanda untuk bekerja sama menghadapi fasisme, kerja sama itu akan lebih berhasil apabila kepada rakyat diberikan hak-hak baru dalam pemerintahan, yaitu suatu parlemen yang dipilih dari, untuk, dan oleh rakyat.

Pada 25 Desember 1939, GAPI membentuk suatu Kongres Rakyat Indonesia (KRI) di Jakarta. Tujuannya adalah Indonesia Raya bertemakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan kesempurnaan cita-cita bangsa Indonesia. Di dalam kongres tersebut ditetapkan bendera merah putih dan lagu *Indonesia Raya* sebagai bendera dan lagu persatuan Indonesia serta pemakaian bahasa Indonesia bagi rakyat Indonesia (Poeponegoro, 1993:232). Gencarnya tuntutan GAPI ini mendorong pemerintah Kolonial Belanda pada 14 September 1940 membentuk Komisi Visman yang bertugas menyelidiki sejauh mana kehendak rakyat dengan perubahan pemerintahan. Namun demikian, jawaban komisi ini adalah bahwa bangsa Indonesia masih ingin tetap berada dalam ikatan dengan Kerajaan Belanda.

## **B. Pengaruh Pendidikan Barat terhadap Pergerakan Nasional**

Di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Idenburg pada (1869–1906), inisiatif politik etis mulai dilaksanakan. Politik ini difokuskan pada tiga bidang, yaitu edukasi, migrasi, dan irigasi. Edukasi ditujukan untuk mendidik rakyat pribumi untuk memiliki keterampilan yang diperlukan dalam rangka mendukung pemerintahan Kolonial Belanda. Karena itu, pemerintah Kolonial Belanda membentuk suatu sekolah untuk mendukung birokrasi pemerintahan tersebut, yaitu sekolah

bagi pamong praja (para pegawai) yang telah bekerja. Tujuan didirikannya sekolah adalah lulusannya akan dipekerjakan di kantor-kantor milik Kolonial Belanda. Selain pendidikan yang merupakan salah satu politik etis, irigasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pertanian yang ada di Indonesia dan migrasi dilakukan dengan tujuan untuk melaksanakan program pemerataan penduduk.

Dalam rangka merealisasikan politik etis, maka pemerintah Kolonial Belanda menata semua sarana untuk mendukung program-program yang akan diterapkan dalam politik etis, yaitu dengan menata sistem pendidikan yang sudah ada. Sekolah yang mulai ditata sistem pendidikannya adalah sekolah pangreh praja. Sekolah ini bertujuan untuk melahirkan para birokrat yang diharapkan dapat membantu pemerintahan Kolonial Belanda. Seiring dengan perkembangan zaman pada saat itu, sekolah ini diubah menjadi sekolah latihan para pejabat pribumi atau disebut OSVIA (*Opleiding School voor Inlandische Ambtenaaren*). Tujuan dari sekolah ini adalah untuk menyiapkan para pribumi menjadi tenaga pemerintahan Kolonial Belanda. Selain mendirikan sekolah-sekolah yang bertujuan untuk menyokong pemerintahan Kolonial Belanda, dibuat juga sekolah kedokteran yang diperuntukan bagi warga pribumi untuk menjadi dokter. Sekolah tersebut bernama STOVIA (*School tot Opleiding van Inlandische Artsen*). Untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan, pemerintah Kolonial Belanda juga membentuk sekolah-sekolah guru bagi pribumi. Tujuan sekolah guru ini atau disebut juga *kweekschool* untuk memberikan pendidikan bagi kaum pribumi untuk menjadi guru yang berpendidikan Belanda. Sekolah-sekolah guru ini didirikan di berbagai kota besar di Hindia Belanda agar warga pribumi dapat dengan mudah memasuki sekolah ini.



Sumber: Ensiklopedi Tema Dunia Islam Jilid 4, 2006

Selain sekolah-sekolah yang merupakan sekolah tinggi, pemerintah Kolonial Belanda juga membangun sekolah-sekolah dasar dan menengah. Penataan sekolah-sekolah ini adalah memberikan pelayanan terhadap pendidikan pada sekolah dasar dan menengah. Pelayanan pendidikan pada sekolah ini dibagi dua, yaitu sebagai berikut.

1. Sekolah *Eerste klasse* (kelas satu) dibuka untuk memberikan pelayanan terhadap anak-anak priyayi atau keturunan bangsawan pribumi. Dalam sekolah ini bahasa yang digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah adalah bahasa Belanda.
2. Sekolah *Tweede klasse* (kelas dua) adalah sekolah untuk melayani dan memberikan pendidikan kepada rakyat biasa, dalam sekolah ini bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa daerah atau bahasa Melayu.

Sekolah kelas satu mengalami perubahan pada 1914 menjadi *Holandsch Indische Schoolen* (HIS) setingkat SD pada masa sekarang diubah. Sekolah ini merupakan sekolah dasar dengan sistem pendidikan model Eropa. Sekolah ini sering disebut sebagai sekolah Belanda-Pribumi. Untuk melanjutkan ke jenjang SMP, maka pemerintah Belanda membuat sekolah

yang bernama *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO). Sekolah ini telah berdiri sejak 1914. Sekolah MULO didirikan untuk kalangan priyayi dan bangsawan. Untuk memberikan pelayanan pendidikan setelah jenjang SMP atau MULO, maka pada 1919 pemerintah Kolonial Belanda membentuk sekolah yang diberi nama *Algemeene Middlebare School* (AMS), yaitu setingkat SMA. Tujuan dari sekolah ini untuk mempersiapkan para siswa yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi.

Dengan adanya sekolah-sekolah yang dibuat oleh Kolonial Belanda, penduduk pribumi yang sekolah pada saat itu sedikit sekali. Penduduk pribumi yang sekolah hanyalah golongan dari bangsawan atau priyayi yang memiliki kesempatan sekolah di HIS, MULO, dan AMS. Sementara penduduk pribumi yang bukan golongan priyai dan bangsawan hanya cukup sekolah di kelas dua. Dengan sedikitnya bangsa pribumi yang sekolah di sekolah-sekolah dasar dan menengah buatan Belanda, maka pada 1920 pemerintah Kolonial Belanda mulai menghapuskan diskriminasi terhadap sistem pendidikan. Hal ini dilakukan karena kurangnya penduduk pribumi yang bersekolah. Sejak tahun itulah, semua penduduk pribumi diperbolehkan untuk sekolah sesuai dengan kemampuan mereka. Pada penghapusan diskriminasi pendidikan ini tidak pandang bulu, semua rakyat harus sekolah, baik dari priyayi atau rakyat biasa.

Penghapusan perbedaan dari kalangan pribumi yang priyayi atau bangsawan dengan rakyat biasa atau perbedaan keturunan dari ras yang berbeda, pemerintah Kolonial Belanda membuka sekolah-sekolah di desa-desa. Bahasa pengantar yang digunakan di sekolah-sekolah tersebut adalah bahasa daerah. Untuk pembiayaan sekolah tersebut adalah biaya dari rakyat dan dibantu oleh pemerintah Kolonial Belanda. Dengan dibukanya sekolah-sekolah di desa, maka penduduk Indonesia pada saat itu mulai banyak yang bersekolah.

Pemerintah Kolonial Belanda tidak saja menata sekolah-sekolah umum yang diperuntukkan bagi bangsawan atau priyayi serta untuk rakyat biasa. Pemerintah Kolonial Belanda juga dalam rangka melaksanakan politik etis membangun sekolah-sekolah keterampilan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang memerlukan keahlian atau keterampilan. Sekolah-sekolah tersebut, di antaranya sekolah pertanian, sekolah teknik, peternakan, perdagangan, dan hukum. Untuk bahasa pengantar digunakan bahasa Belanda dalam proses belajar mengajar.

Dengan munculnya berbagai sekolah, maka berpengaruh pula terhadap peningkatan pendidikan yang ada di Indonesia. Di antaranya banyak bermunculan sekolah yang didirikan nonpemerintah, misalnya sekolah-sekolah Islam yang dikelola oleh pesantren. Selain itu, banyak sekolah-sekolah yang dipelopori oleh para pejuang pergerakan perempuan, misalnya sekolah perempuan yang dibuat oleh R.A. Kartini di Jawa Tengah dan Raden Dewi Sartika di Jawa Barat. Dengan demikian, kebutuhan akan pendidikan pada saat itu mulai terpenuhi. Rakyat Indonesia mulai berpikir untuk berpendidikan. Hal ini sangat penting karena kelompok-kelompok terpelajarlah yang kali pertama menyadari akan penjajahan Belanda harus diakhiri di negeri ini. Kaum cerdik cendikia inilah yang menginginkan negara dengan pemerintahan sendiri. Hal ini merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam pergerakan untuk memperjuangkan bangsa Indonesia merdeka. Golongan pelajar inilah yang berperan penting dalam melakukan gerakan nasional menuju kemerdekaan.

Selain golongan pelajar yang dibentuk dengan pengajaran dari Barat, peran pendidikan Islam pun dalam melahirkan para nasionalis begitu penting. Sekolah-sekolah yang bernapaskan Islam banyak didirikan sehingga memunculkan golongan terpelajar Islam di pesantren-pesantren. Dengan banyaknya kaum pelajar dari kalangan umat Islam, maka bermunculanlah

tokoh-tokoh Islam yang modern. Mereka disebut golongan modernis. Kelompok-kelompok Islam bermunculan dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kelompok ini menyadari bahwa rakyat Indonesia sangat miskin, terbelakang, dan tidak berpendidikan, serta memerlukan perjuangan untuk peningkatan di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, dan politik.

Dengan bermunculannya para cendikia Islam, maka kekuatan dalam memperjuangkan bangsa Indonesia semakin kuat karena yang bergerak pada perjuangan ini adalah hasil pendidikan Islam dan hasil pendidikan dari bangsa Belanda sendiri. Untuk itu, terlahirlah tokoh-tokoh Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan dan menjadi tokoh pergerakan nasional. Dengan bersatunya para tokoh ini, maka cita-cita akan kemerdekaan dapat terwujud walaupun membutuhkan proses yang begitu lama.

Peranan para golongan pelajar dalam menumbuhkan kesadaran tampak pada kegiatan diskusi sosial ataupun politik. Peranan para terpelajar ini tampak dilakukan melalui berbagai organisasi yang berperan memperjuangkan kemerdekaan. Selain itu, dengan bermunculannya kaum terpelajar, mereka dapat mengkritisi atas kebijakan politik Kolonial Belanda yang telah dilancarkan melalui praktik diskriminasi terhadap bangsa pribumi, baik dalam pelayanan ataupun pendidikan.

### **C. Sumpah Pemuda**

Sejak 1915, telah berdiri sejumlah besar organisasi kepemudaan, seperti Tri Koro Dharmo yang kemudian menjadi Jong Java (1915), Jong Sumatranen Bond (1917), Jong Islamieten Bond (1924), Jong Batak, Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Ambon, Sekar Rukun, dan Pemuda Kaum Betawi. Namun, semua organisasi tersebut bersifat kedaerahan dan kelompok

khusus. Akan tetapi, ada juga organisasi yang berdiri setelah diadakan Kongres Pemuda I, yaitu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) pada 1926. PPPI merupakan wadah pemuda nasionalis radikal nonkedaerahan. Tokoh-tokohnya adalah Sigit, Soegondo Djojopoespito, Suwirjo, S. Reksodipoetro, Muhammad Yamin, A. K Gani, Tamzil, Soenarko, Soemanang, dan Amir Sjarifuddin.

Pada awal Kongres Pemuda I terdapat pimpinan kerapatan yaitu wakil-wakil dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Pemuda Indonesia, Pemuda Sumatra, Jong Java, Jong Celebes, Jong Batak, Pemuda Kaum Betawi, Jong Islamieten Bond (JIB), dan Sekar Rukun. Selanjutnya, juga diberitakan bahwa kerapatan dikunjungi beratus-ratus orang, dimana bagi siapa yang menyaksikan sendiri akan berbesar hati karena pemuda-pemuda kita tidak baru mencita-citakan saja, tetapi telah tegak berdiri di pusat persatuan dan kebangsaan. Dalam kesempatan ini pun telah diperdengarkan untuk pertama kali kepada umum oleh pemuda, yaitu lagu "Indonesia Raya", ciptaan W.R. Supratman.

Dalam putusan kongres pemuda-pemudi Indonesia, tercatat bahwa Putra dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia. Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sebagai realisasi penyatuan ini, pada 31 Desember 1930, pukul 12 malam, Jong Java, Perhimpunan Pemuda Indonesia, Jong Celebes, Pemuda Sumatra (awalnya bernama Jong Sumatranen Bond) telah berfusi menjadi satu dan membentuk perkumpulan **INDONESIA MUDA**.

Para anggota panitia Kongres Pemuda II terdiri dari pemuda-pemudi Indonesia yang di kemudian hari amat berperan dalam gerakan pemuda yang memperjuangkan

kebangsaan dan kemerdekaan. Di antaranya terdapat nama, Soegondo Djojopoespito dari PPPI (ketua), Djoko Marsaid dari Jong Java (wakil ketua), Muhammad Yamin dari Jong Sumatranen Bond (sekretaris), Amir Sjarifuddin dari Jong Sumatranen Bond (bendahara), Djohan Mu.Tjai dari Jong Islamieten Bond. Kontjosoengkoeno dari P.I, Senduk dari Jong Celebes, J.Lemeina dari Jong Ambon, dan Rohyani dari Pemuda Kaum Betawi. Panitia didukung tokoh-tokoh senior seperti Mr.Sartono, Mr.Muh Nazif, A.I.Z Mononutu, dan Mr.Soenario. Dalam kongres ikut berbicara tokoh-tokoh besar kebangsaan lainnya, seperti S. Mangoensarkoro, Ki Hajar Dewantara, dan Djokosarwono .

Hadir sebagai undangan sekitar 750 orang. Di antaranya terdapat nama-nama yang kemudian terkenal, seperti Kartakusumah (PNI Bandung), Abdulrachman (B.O Jakarta), Karto Soewirjo (P.B Serikat Islam), Muh. Roem, Soewirjo, Sumanang, Masdani, Anwari, Tamzil, AK Gani, Kasman Singodimedjo, Saerun (wartawan Keng Po), dan W.R. Supratman. Dari *Volksraad* yang hadir adalah Soerjono dan Soekawati dan dari pihak pemerintah Hindia Belanda yang hadir adalah Dr.Pyper dan Van der Plas.

Jelas bahwa Kongres Pemuda II diikrarkan Sumpah Pemuda bukan pekerjaan mudah dan bukan juga hasil usaha dari beberapa gelintir orang saja. Hal ini merupakan perjuangan panjang sejak Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908. Bahkan, ada sebuah peristiwa lainnya, yaitu ketika 1904, Dr. A. Rivai lulus ujian dokter sebagai *Nederland Arts* di Utrecht Belanda, pupus sudahlah anggapan jelek bahwa bangsa Indonesia itu "*Laksheid*". Kata ini amat sakit didengar karena berarti pemalas, tidak punya kemauan bekerja atau berbuat sesuatu.

Isi Sumpah Pemuda, yaitu sebagai berikut:

**PERTAMA**, Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, Mengakoe Bertoempah Darah Jang Satoe, Tanah Indonesia.

**KEDOEA**, Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, Mengakoe Berbangsa Jang Satoe, Bangsa Indonesia.

**KETIGA**, Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, Mendjoendjoeng Bahasa Persatoean, Bahasa Indonesia.

#### D. Pergerakan Kaum Wanita

Pada awalnya pergerakan wanita Indonesia dilakukan oleh perseorangan. Pelopor pergerakan wanita pada masa itu ialah R.A Kartini dan R. Dewi Sartika. Keduanya ingin mengangkat derajat kaum wanita melalui pendidikan. Perhatian yang besar dari R.A Kartini dan R. Dewi Sartika terhadap kaum wanita telah mengilhami pergerakan kaum wanita untuk membentuk organisasi. Pada awalnya tujuan organisasi perempuan tersebut untuk memperbaiki kedudukan sosialnya. Namun, dalam perkembangannya organisasi itu juga berwawasan kebangsaan.

Gagasan kemajuan pergerakan wanita terutama yang menjadi pokok perjuangan adalah R.A. Kartini seperti dicerminkan dalam surat-surat pribadinya yang diterbitkan pada 1912. Atas usahanya maka terbitlah sebuah buku yang berjudul "Habis Gelap Terbitlah Terang." Dengan terbitnya buku ini menimbulkan kegairahan bagi pergerakan emansipasi wanita dalam sebuah pergerakan yang berperan dalam pendidikan di Indonesia serta di negeri lain.

Pada masa itu, para wanita masih terikat akan adat istiadat lama dan sedikit sekali yang memperoleh kebahagiaan dari kemajuan pengajaran. Untuk keluar rumah mereka dilarang keras. Padahal para perempuan tersebut ingin mendapatkan pengajaran yang sama dengan laki-laki. Kehidupan para gadis yang dilarang keluar rumah sebetulnya hanyalah pada kalangan menak, berbeda dengan kehidupan para gadis petani yang hidup penuh dengan pekerjaan. Namun, keterbelakangan pendidikan menjadi pola hidup kaum gadis petani.

Dengan melihat keadaan yang demikian, Kartini mendambakan kehidupan pengajaran bagi-bagi perempuan yang ia tulis dalam suratnya. Mereka ingin mendapatkan pengajaran bukan untuk menyaingi kaum laki-laki dalam perjalanan hidupnya, melainkan mereka ingin menjadi perempuan yang cakap dalam melakukan kewajiban-kewajibannya menjadi seorang perempuan.

Usaha yang pertama dilakukan adalah mendirikan sebuah kelas kecil bagi kepentingan gadis-gadis, yang diselenggarakan empat kali dalam seminggu. Para gadis ini mendapatkan pengajaran mengenai membaca dan menulis, kerajinan tangan, serta memasak dan menjahit.

Dengan proses yang lama pada 1904, di Jawa Barat berdiri pula sekolah yang dikelola oleh Raden Dewi Sartika. Semula sekolah ini bernama sekolah istri, namun kemudian berubah menjadi sekolah *Kautamaan Istri*.

Dengan usaha-usaha perseorangan inilah mulai dikenal dengan gerakan wanita Indonesia. Dewi Sartika merupakan salah seorang dari sembilan wanita yang menulis gagasannya bagi sebuah panitia pemerintahan Hindia Belanda yang menyelidiki sebab-sebab kemunduran kemakmuran penduduk di Jawa. Peningkatan derajat wanita merupakan salah satu pokok dalam masalah kesejahteraan umum, dan perkembangan kecerdasan penduduk Indonesia tidaklah begitu cepat dan kuat.

Di segala kemajuan, wanita merupakan faktor yang nyata dalam perkembangan budaya suatu bangsa.

Sejarah Hari Ibu diawali dari bertemunya para pejuang wanita dengan mengadakan Kongres Perempuan Indonesia I pada 22–25 Desember 1928 di Yogyakarta, di gedung yang kemudian dikenal sebagai Mandalabhakti Wanitatama di Jalan Adisucipto. Dihadiri oleh sekitar 30 organisasi perempuan dari 12 kota di Jawa dan Sumatra. Hasil dari kongres tersebut salah satunya adalah membentuk Kongres Perempuan yang kini dikenal sebagai *Kongres Wanita Indonesia*.

Organisasi perempuan sendiri sudah ada sejak 1912, dililhami oleh perjuangan para pahlawan wanita abad ke-19 seperti M. Christina Tiahahu, Cut Nya Dien, Cut Mutiah, R.A. Kartini, Walanda Maramis, Dewi Sartika, Nyai Achmad Dahlan, Rangkayo Rasuna Said, dan lain-lain. Peristiwa itu dianggap sebagai salah satu tonggak penting sejarah perjuangan kaum perempuan Indonesia. Pemimpin organisasi perempuan dari berbagai wilayah Nusantara berkumpul menyatukan pikiran dan semangat untuk berjuang menuju kemerdekaan dan perbaikan nasib kaum perempuan.

Penetapan 22 Desember sebagai perayaan Hari Ibu diputuskan dalam Kongres Perempuan Indonesia III pada tahun 1938. Menguatnya kajian gerakan perempuan bersandar pada Kartini, setidaknya karena ia meninggalkan *written text*, yaitu surat-surat yang ditulisnya dan lalu diterbitkan dalam sebuah buku yang amat terkenal, *"Habis Gelap Terbitlah Terang"*. (Maria Hartiningsih: 2000). Berkaitan dengan buku tersebut, tidak sedikit pula para ahli yang menyangsikan keasliannya sebagai karya asli Kartini (Saskia Eleonora Wieringa: 1999). Kajian lain justru menunjukkan, tokoh seperti Dewi Sartika, sebenarnya jauh lebih jelas melakukan tindakan-tindakan aksi ketimbang Kartini yang tidak pernah melakukan apa-apa. Dewi Sartika mendirikan sekolah pertamanya pada 1904 dengan

nama Sekolah Istri dan selanjutnya diubah menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Sampai 1912, Dewi Sartika telah mendirikan 9 sekolah, jumlah yang mencapai 50% dari keseluruhan sekolah di Pasundan (Marianne Katoppo: 2000).

Kecurigaan sebagian peneliti terhadap *written text* itu, setidaknya bersandar pada kemungkinan adanya keinginan Belanda untuk membuktikan keberhasilan politik etis, dengan dibukanya peluang-peluang bagi bangsa Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Sebab, semangat pendidikan di Indonesia akibat politik etis—sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, tetapi lebih untuk menunjang terselenggaranya pemerintah Hindia Belanda. Mereka yang telah mendapatkan pendidikan dimaksudkan agar bisa dapat bekerja di kantor-kantor pemerintahan Belanda. Sudah pasti, kebanyakan hanya menduduki jabatan pegawai rendahan. (Sukanti Suryochondro: 1995).

## Bab III

### **Masa Pendudukan Jepang (1942–1945)**

MASA pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada 1942 dan berakhir pada 17 Agustus 1945 seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan M. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada Mei 1940, awal Perang Dunia II, Belanda diduduki oleh Nazi Jerman. Hindia Belanda mengumumkan keadaan siaga dan pada bulan Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke AS dan Britania. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal pada Juni 1941, dan Jepang mulai melakukan penaklukan Asia Tenggara pada bulan Desember tahun itu. Di bulan yang sama, faksi dari Sumatra menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942.

Pada Juli 1942, Soekarno menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintahan yang juga dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. Soekarno, Mohammad Hatta, dan para Kyai didekorasi oleh Kaisar Jepang pada 1943. Akan tetapi, pengalaman dari penguasaan Jepang di Indonesia sangat bervariasi bergantung di mana seseorang hidup dan status sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat

perbudakan seks, penahanan sembarang, hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia-Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang.

Admiral Isoroku Yamamoto, Panglima Angkatan Laut Jepang, mengembangkan strategi perang yang sangat berani, yaitu mengerahkan seluruh kekuatan armadanya untuk dua operasi besar. Seluruh potensi Angkatan Laut Jepang mencakup 6 kapal induk (pengangkut pesawat tempur), 10 kapal perang, 18 kapal penjelajah berat, 20 kapal penjelajah ringan, 4 kapal pengangkut perlengkapan, 112 kapal perusak, 65 kapal selam, serta 2.274 pesawat tempur. Kekuatan pertama, yaitu 6 kapal induk, 2 kapal perang, 11 kapal perusak serta lebih dari 1.400 pesawat tempur, tanggal 7 Desember 1941, akan menyerang secara mendadak basis Armada Pasifik, Amerika Serikat, di Pearl Harbor di Kepulauan Hawaii. Sementara kekuatan kedua, sisa kekuatan Angkatan Laut yang mereka miliki, mendukung Angkatan Darat dalam Operasi Selatan, yaitu penyerangan atas Filipina dan Malaya/Singapura, yang akan dilanjutkan ke Jawa.

Kekuatan yang dikerahkan ke Asia Tenggara adalah 11 Divisi Infantri yang didukung oleh 7 resimen tank serta 795 pesawat tempur. Seluruh operasi direncanakan selesai dalam 150 hari. Admiral Chuichi Nagumo memimpin armada yang ditugaskan menyerang Pearl Harbor. Hari Minggu pagi 7 Desember 1941, 360 pesawat terbang yang terdiri dari pengebom pembawa torpedo serta sejumlah pesawat tempur diberangkatkan dalam dua gelombang. Pengeboman Pearl Harbor ini berhasil menenggelamkan dua kapal perang besar serta merusak 6 kapal perang lain. Selain itu, pengeboman Jepang tersebut juga menghancurkan 180 pesawat tempur Amerika. Lebih dari 2.330 serdadu Amerika tewas dan lebih dari 1.140 lainnya luka-luka. Namun, tiga kapal induk Amerika

selamat, karena pada saat itu tidak berada di Pearl Harbor. Pada 8 Desember 1941, Kongres Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang.

Perang Pasifik ini berpengaruh besar terhadap gerakan kemerdekaan negara-negara di Asia Timur, termasuk Indonesia. Tujuan Jepang menyerang dan menduduki Hindia Belanda adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dan Sumatra sebagai sumber minyak utama.

Militer Jepang membuat tiga kesalahan besar terhadap bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut.

1. **Kerja paksa**, banyak laki-laki Indonesia diambil dari tengah keluarga mereka dan dikirim hingga ke Burma (Myanmar sekarang) untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan banyak pekerjaan berat lainnya dalam kondisi-kondisi yang sangat buruk. Ribuan orang mati atau hilang.
2. **Pengambilan paksa**, tentara-tentara Jepang dengan paksa mengambil makanan, pakaian, dan berbagai pasokan lainnya dari keluarga-keluarga Indonesia, tanpa memberikan ganti rugi. Hal ini menyebabkan kelaparan dan penderitaan semasa perang.
3. **Perbudakan paksa**, terhadap perempuan, banyak perempuan Indonesia yang dijadikan "wanita penghibur" bagi tentara-tentara Jepang. Selain itu, Jepang menahan banyak warga sipil Belanda di kamp-kamp tahanan dalam kondisi-kondisi yang sangat buruk, dan memperlakukan tahanan perang militer di Indonesia dalam keadaan yang buruk pula.

Namun, kejahatan-kejahatan perang —yang sangat serius—pada kenyataannya tidak seburuk dengan apa yang dilakukan di Tiongkok atau Korea pada masa yang sama. Sejumlah komandan, seperti Jend. Imamura di Jawa, secara terbuka dikritik di koran-koran Jepang karena terlalu “lunak”. Bahkan, ada sejumlah perwira Jepang yang bersimpati dengan gagasan kemerdekaan Indonesia. Mereka bahkan memberikan dukungan mereka kepada tokoh-tokoh dan organisasi politik Indonesia hingga kepada Soekarno sendiri.

Pada 6 Agustus 1945, pukul 08.15, bom atom pertama dijatuhkan di Hiroshima, menyebabkan lebih 70 ribu orang dari kota yang berpenduduk 350 ribu jiwa tewas seketika. Pada 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan ke Nagasaki. Sepertiga kota itu hancur dan tidak kurang 75 ribu orang tewas. Kaisar Hirohito menganggap Jepang sudah tidak mungkin lagi meneruskan peperangan dan kemudian memaklumkan kekalahannya —menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.

Menyerahnya Jepang hampir tidak diketahui rakyat di Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, rakyat buta terhadap berita-berita luar negeri. Semua radio disegel. Mereka yang ketahuan mendengarkan siaran radio musuh sangat besar risikonya: ditangkap Kempetai (polisi militer Jepang) dan dituduh mata-mata musuh. Tuduhan yang bisa membawa kematian orang bersangkutan.

Mengingat banyak generasi sekarang yang tidak tahu kehidupan saat itu, baiklah kita kutip catatan dari seorang pimpinan Barisan Pelopor (Korps Pionir) tentang situasi akhir 1944. Ketika Jepang bertekuk lutut, yang mendengar kekalahan itu, antara lain Sutan Sjahrir. Ia dikenal sebagai tokoh anti-Jepang yang bekerja di bawah tanah dan selalu mendengarkan siaran radio gelap. Pemuda Minang bertubuh kecil ini kemudian menyebarkan berita kekalahan Jepang itu kepada para pemuda. Para pemuda pun mendesak Bung Karno agar segera memproklamasikan

kemerdekaan, bahkan kemudian menculiknya bersama Bung Hatta dan Ibu Fatmawati ke Rengasdengklok, kota kecamatan di Karawang, Jawa Barat.

Bung Karno rupanya tidak pernah melupakan "penghinaan" Sjahrir ini. Dalam biografinya seperti dituturkan kepada Cindy Adams, Bung Karno mengatakan, Ketika Bung Karno dan Bung Hatta hendak masuk mobilnya, Chaerul Saleh menghampiri mereka, dan berkata, "Proklamirkan." Jakarta kala itu sangat tegang. Golongan tua termasuk Bung Karno dan Bung Hatta berpendapat sebaiknya kemerdekaan dicapai tanpa pertumpahan darah. Ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak Jepang. Sebaliknya, kelompok pemuda sudah tidak sabar lagi. Kemerdekaan harus segera diproklamasikan tanpa bantuan dan melibatkan bangsa asing mana pun.

Pada 15 Agustus 1945, pukul 20.00, di salah satu ruangan Lembaga Bakteriologi, di Pegangsaan Timur 17 (sekarang Fakultas Kesehatan Masyarakat UI), para pemuda dan mahasiswa mengadakan pertemuan di bawah pimpinan Chaerul Saleh. Hasilnya, pukul 23.00 mereka mengutus Wikana dan Darwis mendatangi Bung Karno dan mendesak agar esok hari (16 Agustus) memproklamasikan kemerdekaan. Bung Karno menolak. Alasannya ia dan Bung Hatta tidak ingin meninggalkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Apalagi PPKI esoknya akan rapat di Jakarta.

Ancaman para pemuda rupanya bukan omong kosong. Pada 16 Agustus 1945 pukul 04.00, setelah sahur, mereka menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok. Di sini sekali lagi para pemuda di bawah pimpinan Sukarni gagal memaksa keduanya untuk memproklamasikan kemerdekaan. "Perdebatan" kelompok muda dan tua terjadi kembali pada menit-menit menjelang proklamasi. Meskipun proklamasi diputuskan akan dibacakan pukul 10.00 di kediaman Bung Karno, para pemuda tetap gelisah. Mereka khawatir tentara

Jepang akan menggagalkannya. Mereka mendesak Bung Karno segera membacakannya tanpa menunggu Bung Hatta. Tanpa disadari kemudian Bunga Hatta datang. Tepat pukul 10.00 tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan RI pun diproklamasikan.

Pada 6 Agustus 1945 sebuah bom atom dijatuhkan di atas Kota Hiroshima di Jepang, oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian, BPUPKI berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau disebut juga *Dokuritsu Zyunbi Inkai* dalam bahasa Jepang, untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan Sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.

Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan Radjiman Wedyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sementara itu, di Indonesia pada 10 Agustus 1945, Sutan Sjahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. Sjahrir memberi tahu penyair Chairil Anwar tentang dijatuhkannya bom atom di Nagasaki dan bahwa Jepang telah menerima ultimatum dari Sekutu untuk menyerah. Sjahrir mengetahui hal itu melalui siaran radio luar negeri, yang ketika itu terlarang. Berita ini kemudian tersebar di lingkungan para pemuda terutama para pendukung Sjahrir.

Pada 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Radjiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, bergantung cara kerja PPKI.<sup>11</sup> Meskipun demikian, Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus.

Dua hari kemudian, saat Soekarno, Hatta, dan Radjiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sjahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan. Ia menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang karena Jepang setiap saat sudah harus menyerah kepada Sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis, antara yang anti dan pro-Jepang. Hatta menceritakan kepada Sjahrir tentang hasil pertemuan di Dalat.

Sementara itu, Sjahrir menyiapkan pengikutnya yang bakal berdemonstrasi dan bahkan mungkin harus siap menghadapi bala tentara Jepang jika mereka akan menggunakan kekerasan. Sjahrir telah menyusun teks proklamasi dan telah dikirimkan ke seluruh Jawa untuk dicetak dan dibagi-bagikan.

Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, dan dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Sjahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sementara itu, Sjahrir menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan "hadiah" dari Jepang.

Pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan

di Indonesia ke tangan Belanda. Sutan Sjahrir, Wikana, Darwis, dan Chaerul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu, mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian Jepang.

Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang (*Gunsei*) untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di *Koningsplein* (Medan Merdeka) tetapi kantor tersebut kosong. Soekarno dan Hatta bersama Soebardjo kemudian ke kantor *Bukanfu*, Laksamana Maeda, di Jalan Imam Bonjol No.1. Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. Sambil menjawab ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Sepulang dari Maeda, Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada pukul 10 malam 16 Agustus, keesokan harinya di kantor Jalan Pejambon No. 2 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan UUD yang sehari sebelumnya telah disiapkan Hatta.

Sehari kemudian, gejolak tekanan yang menghendaki pengambilalihan kekuasaan oleh Indonesia semakin memuncak dilancarkan para pengikut Sjahrir. Rapat PPKI pada 16 Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Peserta rapat tidak tahu telah terjadi peristiwa Rengasdengklok.

Para pemuda pejuang, termasuk Chaerul Saleh, yang tergabung dalam gerakan bawah tanah kehilangan kesabaran,

dan pada dini hari 16 Agustus 1945 bersama Shodanco Singgih, salah seorang anggota PETA, dan pemuda lain, mereka menculik Soekarno (bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan) dan Hatta, lalu membawanya ke Rengasdengklok, yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengasdengklok. Tujuannya agar Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apa pun risikonya.

Di Jakarta, golongan muda, Wikana, dan golongan tua, yaitu Mr. Ahmad Soebardjo melakukan perundingan. Mr. Ahmad Soebardjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta, maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Soebardjo ke Rengasdengklok. Mereka menjemput Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta kembali ke Jakarta. Mr. Ahmad Soebardjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Setelah tiba di Jakarta, mereka langsung menuju ke rumah Laksamana Maeda di Jl. Imam Bonjol No. 1 (sekarang gedung Museum Perumusan Teks Proklamasi) yang diperkirakan aman dari Jepang. Sekitar 15 pemuda menuntut Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan melalui radio, disusul pengambilalihan kekuasaan. Mereka juga menolak rencana PPKI untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 16 Agustus.

Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, bertemu dengan Letnan Jenderal Moichiro Yamamoto, Komandan Angkatan Darat pemerintahan militer Jepang (*Gunseikan*) di Hindia Belanda dengan sepengetahuan Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum pemerintahan militer Jepang. Dari komunikasi antara Hatta dan tangan kanan komandan Jepang di Jawa ini, Soekarno dan Hatta menjadi yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu, dan tidak memiliki wewenang lagi untuk memberikan kemerdekaan.

Setelah itu mereka bermalam di kediaman Laksamana Maeda (kini Jalan Imam Bonjol No.1) untuk melakukan rapat menyiapkan teks Proklamasi. Rapat dihadiri oleh Soekarno, M. Hatta, Ahmad Soebardjo, Soekarni, dan Sajuti Melik. Setelah konsep disepakati, Sajuti menyalin dan mengetik naskah tersebut. Pada awalnya pembacaan Proklamasi akan dilakukan di Lapangan Ikada, namun berhubung alasan keamanan dipindahkan ke kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56<sup>(2)</sup> (sekarang Jl. Proklamasi No. 1).

Sebelumnya para pemuda mengusulkan agar naskah Proklamasi menyatakan semua aparat pemerintahan harus dikuasai oleh rakyat dari pihak asing yang masih menguasainya. Akan tetapi, mayoritas anggota PPKI menolaknya dan disetujui naskah Proklamasi seperti adanya hingga sekarang. Para pemuda juga menuntut enam pemuda turut menandatangani Proklamasi bersama Soekarno dan Hatta, bukan para anggota PPKI. Para pemuda menganggap PPKI mewakili Jepang. Kompromi pun terwujud dengan membubuhkan anak kalimat "atas nama Bangsa Indonesia" Soekarno-Hatta.

Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02.00—04.00 dini hari. Teks Proklamasi ditulis di ruang makan di kediaman Soekarno, Jl. Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Para penyusun teks Proklamasi itu adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo. Konsep teks Proklamasi ditulis oleh Ir. Soekarno sendiri. Di ruang depan, hadir B.M Diah Sajuti Melik, Sukarni, dan Soediro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks Proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks Proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sajuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur No. 56 telah hadir, antara lain Soewirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani, dan Trimurti. Isi teks Proklamasi Kemerdekaan yang singkat ini adalah sebagai berikut.

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjelakan kemerdekaan, semua Hal yang mengenai ~~perintah~~ <sup>kepentingan</sup> dan keamanan d.l.l., diuruskan dengan cara saksonia dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Djakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945  
Wakil bangsa Indonesia

Sumber: photobucket, 2009 [31-Agustus 2009]

Di sini ditulis tahun 05 karena ini sesuai dengan tahun Jepang yang kala itu adalah tahun 2605.

Teks tersebut merupakan hasil ketikan dari Sajuti Melik (atau Sajoeti Melik), salah seorang tokoh pemuda yang ikut andil dalam persiapan Proklamasi. Sementara naskah yang sebenarnya hasil gubahan Moh. Hatta, A. Soebardjo, dan dibantu oleh Ir. Soekarno sebagai pencatat. Adapun bunyi teks naskah otentik itu sebagai berikut:

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjelakan Proklamasi Kemerdekaan.

Hal-hal yang mengenai pemerintahan d.l.l., diuruskan dengan cara saksonia dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Djakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945  
Wakil bangsa Indonesia.

Soekarno/Hatta  
Soekarno  
Hatta

Sumber: Catatansejarah, 2009 [31-Agustus 2009]

Acara dimulai pada pukul 10.00 dengan pembacaan Proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera Merah Putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Soewirjo, wakil Walikota Jakarta saat itu dan Moewardi, pimpinan Barisan Pelopor.

Pada awalnya Trimurti diminta untuk menaikkan bendera namun ia menolak dengan alasan pengerekan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu, ditunjuklah Latief Hendraningrat, seorang prajurit PETA, dibantu oleh Soehoed untuk tugas tersebut. Seorang pemuda muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera Merah Putih (Sang Saka Merah Putih), yang dijahit oleh Ibu Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya.<sup>14)</sup> Sampai saat ini, bendera Pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Monumen Nasional.

Setelah upacara selesai berlangsung, kurang lebih 100 orang anggota Barisan Pelopor yang dipimpin S. Brata datang terburu-buru karena mereka tidak mengetahui perubahan tempat mendadak dari Ikada ke Pegangsaan. Mereka menuntut Soekarno mengulang pembacaan Proklamasi, namun ditolak. Akhirnya, Hatta memberikan amanat singkat kepada mereka.

Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengambil keputusan, mengesahkan, dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 45. Dengan demikian, terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik (NKRI) dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan dibentuk kemudian.



Sumber: *Ensiklopedi Tema Dunia Islam Jilid 4*, 2006

Setelah itu, Soekarno dan Moh. Hatta terpilih atas usul dari Otto Iskandardinata dan persetujuan dari PPKI sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan wakil presiden akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional.

## **GARIS WAKTU JEPANG MENGUASAI WILAYAH INDONESIA**

### **Tahun 1940**

- ◆ Februari, Belanda kembali menolak otonomi untuk Hindia Belanda.
- ◆ 13 Februari, Jepang menolak perjanjian arbitrase dengan Belanda.
- ◆ 18 Maret, Hamengkubuwono IX menjadi Sultan Yogyakarta.



## Kehidupan pada Masa Pra-Indonesia: Zaman Pergerakan

- Mei, Belanda jatuh ke tangan Jerman, pemerintah Belanda melarikan diri ke London.
- 28 Juni, Jepang mengatakan ingin merundingkan kembali perjanjian dagang dengan Belanda.
- Juli, barang ekspor Indonesia ke Jepang dihentikan.
- Agustus, Jepang menyatakan bahwa Prancis Indochina dan Hindia Belanda harus disatukan dengan sepenuh hati ke dalam *"East Asia Co-Prosperity Sphere"*.
- 9 Agustus, GAPI menghadirkan petisi yang lain tentang *"melengkapi demokratisasi Indonesia"*.
- 23 Agustus, komisi untuk Studi Perubahan Konstitusional dibentuk untuk mempelajari permintaan GAPI. Thamrin, dkk. di Volksraad menarik proposal mereka untuk demokratisasi.
- September, tentara Jepang bergerak menuju Prancis Indochina.
- 12 September, Pemerintah Hindia Belanda memulai pembicaraan perdagangan dengan delegasi Jepang di bawah pimpinan Kobayashi. Van Mook tidak mau bekerja sama dengan tuntutan Jepang untuk bahan bakar penerbangan.
- 26 Oktober, Jepang dan Belanda mengeluarkan sebuah deklarasi bersama yang berisi Hindia Belanda tidak akan menjadi bagian dari *"Co-Prosperity Sphere"*.
- 12 November, kuota atas penjualan minyak ke Jepang dari Hindia Belanda ditetapkan dalam perjanjian.
- 6 Januari, Belanda menangkap Thamrin, Douwes Dekker dan beberapa tokoh nasionalis lain. Thamrin meninggal di tahanan lima hari kemudian. Douwes Dekker diasingkan ke Suriname.

- ◆ **11 Januari**, tim perundingan Jepang yang baru dan lebih agresif di bawah Yoshizawa tiba di Batavia.
- ◆ **Februari**, tekanan Jepang yang kian meningkat terhadap pemerintah Hindia Belanda untuk "bergabung dengan Wilayah Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya" ditolak Van Mook.
- ◆ **14 Mei**, Jepang mengirimkan sebuah ultimatum kepada pemerintah Hindia Belanda, menuntut agar pengaruh dan kehadiran Jepang dibiarkan di wilayah ini.
- ◆ **6 Juni**, perundingan antara Belanda dan Jepang gagal. Pemerintah Hindia Belanda menjawab bahwa tidak akan ada konsesi yang akan diberikan kepada Jepang, dan bahwa semua produk strategis (termasuk minyak dan karet) telah dikontrakkan untuk dikapalkan ke Britania dan Amerika Serikat.
- ◆ **11 Juli**, Volksraad membentuk sebuah milisi Indonesia.
- ◆ **25 Juli**, Jepang mengumumkan pembentukan sebuah "protektorat" atas Indochina.
- ◆ **26 Juli**, semua aset Jepang di Hindia Belanda dibekukan.
- ◆ **30 Juli**, Pemerintah Belanda di pembuangan menjanjikan untuk mengadakan konferensi tentang Indonesia setelah perang.
- ◆ **30 November**, Angkatan Laut Belanda di Hindia mulai dimobilisasi.
- ◆ **5 Desember**, Pemerintah Hindia Belanda mengirim permintaan kepada Australia untuk mengirimkan pasukannya ke Ambon dan Timor. Pesawat-pesawat Angkatan Udara Australia dan personilnya tiba pada 7 Desember.
- ◆ **8 Desember**, Jepang menyerang Malaya, mendarat di ujung selatan Thailand dan utara Malaya. Jepang mulai

menyerang Filipina. Belanda, di antara bangsa-bangsa lainnya, perang terhadap Jepang.

- ◆ **10 Desember**, kapal-kapal perang Britania, *Prince of Wales* dan *Repulse* ditenggelamkan dalam perbedaan beberapa jam saja satu sama lain di lepas Pantai Malaya.
- ◆ **16 Desember**, orang-orang Aceh yang anti-Belanda mengadakan hubungan dengan pasukan-pasukan Jepang di Malaya.
- ◆ **17 Desember**, pasukan yang dipimpin oleh Australia mendarat di Timor Timur. Diktator Portugal, Salazar memprotes.
- ◆ **17 Desember**, Jepang melakukan serangan udara atas Ternate.

Jepang mendarat di Sarawak.

- ◆ **22 Desember**, pasukan invasi utama Jepang mendarat di Filipina.  
Hatta menulis sebuah artikel surat kabar yang menyerukan agar bangsa Indonesia melawan Jepang.
- ◆ **24 Desember**, Jepang menyerang pasukan-pasukan Britania di Kuching, Sarawak.

## Tahun 1942

### Januari

- ◆ **2 Januari**, Jepang merebut Kota Manila.
- ◆ **3 Januari**, Jepang merebut Sabah.
- ◆ **6 Januari**, Jepang merebut Brunei.
- ◆ **6 Januari**, Serangan udara Jepang pertama atas Ambon.
- ◆ **10 Januari**, Jepang mulai menginvasi Indonesia di Kalimantan (Tarakan) dan Sulawesi (Manado).



- ◆ 11 Januari, Jepang merebut Tarakan.
- ◆ 12 Januari, Van Mook melakukan perjalanan darurat ke Amerika Serikat, meminta tambahan pasukan, dan agar Hindia Belanda tidak dilupakan dalam pertahanan Sekutu.
- ◆ 13 Januari, Jepang merebut Manado.
- ◆ 15 Januari, Jen. Wavell dari Britania mengambil alih komando atas ABDACOM, komando gabungan Sekutu pertama (Australia, Britania, Belanda, Amerika) di dalam perang.
- ◆ 16 Januari, agen-agen Aceh kembali dari Malaya dengan janji-janji dukungan Jepang dalam melawan Belanda.
- ◆ 23 Januari, Jepang merebut Balikpapan meskipun terdapat serangan balasan dari Belanda dan AS.
- ◆ 25 Januari, Jepang merebut Kendari di Sulawesi.
- ◆ 30 Januari, Jepang menyerang Ambon. Pasukan-pasukan KNIL dan Australia menghancurkan pasokan agar tidak jatuh ke tangan Jepang. Kota Ambon direbut dalam tempo 24 jam. Pertempuran berlanjut hingga 2 Februari. Sejumlah 90 persen pasukan pertahanan Australia menjadi korban, banyak di antaranya yang dibantai pada Februari setelah ditawan.
- ◆ Pasukan Britania mengevakuasi Malaya dan lari ke Singapura

## Februari

- ◆ 1 Februari, Jepang merebut Pontianak.
- ◆ 3 Februari, Jepang mengebom Surabaya, memulai serangan udara terhadap sasaran-sasaran di Jawa.

- 4 Februari, pertempuran Selat Makassar (pertempuran laut antara Kalimantan dan Sulawesi); Angkatan Udara dan Laut Jepang memaksa Sekutu untuk mundur hingga ke Cilacap. Jepang maju hingga ke Sulawesi.
- 6 Februari, Jepang mulai mengebom Palembang.
- 8 Februari, Jepang mulai melakukan serangan utama atas Singapura.
- 9 Februari, Jepang mengebom Batavia, Surabaya, dan Malang.
- 10 Februari, Jepang merebut Makassar.
- 13 Februari, Jepang mendaratkan pasukan parasut di Palembang, merebut kota dan industri minyaknya yang berharga.
- 15 Februari, Singapura jatuh; 130.000 pasukan di bawah komando Britania ditawan sebagai tawanan perang.
- 18 Februari, Van Mook di Australia, memohon agar pasukan Sekutu melakukan serangan. Bali diduduki Jepang.
- 19 Februari, pertempuran Selat Badung (pertempuran laut antara Bali dan Lombok); sebuah satuan kecil pasukan Jepang memukul mundur pasukan Belanda dan Australia. Jepang mendarat di Bali. Serangan udara pertama Jepang atas Darwin, Australia.
- 20 Februari, Jepang mendarat di Timor dan 24 Februari tentara Jepang telah menguasai Timor.
- 23 Februari, revolusi melawan Belanda dimulai di Aceh dan Sumatra Utara, dengan dukungan Jepang.
- Belanda memindahkan Soekarno ke Padang; Soekarno lolos dalam kekacauan, sementara Belanda melakukan evakuasi.

Belanda mengevakuasi Sjahrir dan Hatta dari Banda lewat udara beberapa menit sebelum Jepang mulai mengebom pulau itu.

Jepang mengklaim Timor; pasukan-pasukan Australia terus melakukan perang gerilya.

- ◆ 27 Februari, pertempuran Laut Jawa; dalam pertempuran di Laut Jawa dekat Surabaya yang berlangsung selama tujuh jam, Angkatan Laut Sekutu dihancurkan, kapal-kapal perusak Amerika lolos ke Australia. Sekutu kehilangan lima kapal perangnya, sedangkan Jepang hanya menderita kerusakan pada satu kapal perusaknya (*Destroyer*). Rear Admiral Karel Willem Frederik Marie Doorman, Komandan Angkatan Laut India-Belanda, yang baru dua hari sebelumnya, 25 Februari 1942 ditunjuk menjadi *Tactical Commander* armada tentara Sekutu ABDACOM, tenggelam bersama kapal perang utamanya (*Flagship*) *De Ruyter*.
- ◆ 28 Februari, tanggal 28 Februari 1942, tentara Angkatan Darat ke-16 di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura mendarat di tiga tempat di Jawa. Pertama adalah pasukan Divisi ke-2 mendarat di Merak, Banten; kedua adalah Resimen ke-230 di Eretan Wetan, dekat Indramayu; ketiga adalah Divisi ke-48 beserta Resimen ke-56 di Kragan. Ketiganya segera menggempur pertahanan tentara Belanda. Setelah merebut Pangkalan Udara Kalijati (sekarang Lanud Suryadarma), Letnan Jenderal Imamura membuat markasnya di sana. Imamura memberikan ultimatum kepada Belanda, bahwa apabila tidak menyerah maka tentara Jepang akan menghancurkan tentara Belanda.

### Maret

Pada Maret 1942, pasukan-pasukan Sekutu di Jawa diberitahukan oleh mata-mata bahwa suatu kekuatan Jepang sejumlah 250.000 sedang mendekati Bandung, sementara kenyataannya kekuatannya hanya sepersepuluh jumlah itu.

Informasi yang keliru itu mungkin merupakan bagian dari alasan mengapa Sekutu menyerah di Jawa.

Belanda sesungguhnya memindahkan kaum Komunis yang ditahan di kamp-kamp penjara di Hindia Belanda, sebagian dari mereka sejak 1926, ke penjara-penjara di Australia ketika Jepang tiba.

- ◆ 1 Maret, pertempuran Selat Sunda; pasukan invasi Jepang mendarat di Banten.
- ◆ Pasukan invasi Jepang mendarat di sebelah barat Surabaya.
- ◆ Serangan udara Jepang atas Medan.
- ◆ 5 Maret, serangan udara Jepang di Cilacap. Jepang masuk ke Batavia.
- ◆ 7 Maret, Jepang merebut Cilacap.
- ◆ 7 Maret, Rangoon jatuh ke tangan Jepang.
- ◆ 8 Maret, Jepang merebut Surabaya.
- ◆ 9 Maret, pada 9 Maret 1942, Gubernur Jenderal Jonkheer Tjarda van Starckenborgh Stachouwer bersama Letnan Jenderal Hein ter Poorten, Panglima Tertinggi Tentara India-Belanda datang ke Kalijati dan dimulai perundingan antara Pemerintah Hindia Belanda dan pihak Tentara Jepang yang dipimpin langsung oleh Letnan Jenderal Imamura. Imamura menyatakan, bahwa Belanda harus menandatangani pernyataan menyerah.

### April

Pada April 1942, sekitar 200 tentara Sekutu yang telah melarikan diri ke bukit-bukit di Jawa Timur dan terus berperang, ditangkap oleh Jepang di bawah perintah Imamura. Mereka dikumpulkan dan dimasukkan ke kandang-kandang ternak

dari bambu, lalu dibawa dengan kereta-kereta api terbuka ke Surabaya, kemudian dibawa ke laut dan dilemparkan ke ikan-ikan hiu, sementara ada juga yang masih di dalam kandang-kandang bambu itu. Irtamura dinyatakan bersalah atas kekejaman ini oleh sebuah pengadilan militer Australia setelah perang.

- ◆ 7 April, tiga orang pegawai Radio Hindia Belanda dihukum mati karena memainkan lagu kebangsaan Belanda pada 18 Maret, setelah menyerahnya Belanda.
- ◆ 7 April, Jepang merebut Ternate. Jepang mencoba untuk membentuk gerakan Tiga A; memulai kampanye.
- ◆ Propaganda, ABDACOM dibubarkan. Britania dan Amerika membagi tanggung jawab perang; Britania akan mencoba untuk merebut kembali Malaya dan Sumatra serta Burma. Sisanya di Pasifik dan Indonesia menjadi tanggung jawab AS (yang bekerja sama dengan Australia).
- ◆ 19 April, Jepang merebut Hollandia (kini Jayapura).

### Mei

- ◆ 9 Mei, Jepang menduduki Lombok.
- ◆ 13 Mei, Jepang menduduki Sumbawa.
- ◆ 14 Mei, Jepang mendarat di Flores, pendudukan selesai pada 17 Mei.
- ◆ 16 Mei, Jepang menduduki Sumba.

### Juni

- ◆ 17 Juni, pemerintah Belanda di pengungsian di London membentuk dewan konsultatif untuk urusan-urusan Hindia Belanda.

## Juli

- Pilihan satu-satunya yang dimiliki Soekarno dan Hatta adalah pura-pura bekerja sama dengan Jepang. Tujuan akhirnya, sudah tentu bukanlah mendukung Jepang, melainkan untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Belakangan, Belanda yang kembali akan mencoba untuk menuduh Soekarno sebagai kolaborator Jepang guna mendapatkan dukungan Britania dalam menghadapi Republik Indonesia yang baru terbentuk.
- Sjahrir memimpin gerakan di bawah tanah dari rumah kakak perempuannya di Cipanas, dekat Bogor. Informasi seringkali didapatkan dan dengan diam-diam dibagikan Soekarno, yang mendapatkannya dari lingkaran dalam Jepang, dan Sjahrir.
- Satuan sisa-sisa tentara KNIL dikirim ke Kai, Aru, dan Kepulauan Tanimbar.
- Jepang mengumpulkan Soekarno, Hatta, dan Sjahrir di Jakarta.
- Soekarno, Hatta, dan Sjahrir bertemu secara rahasia. Soekarno mengumpulkan massa untuk kemerdekaan, Hatta menangani hubungan-hubungan diplomatik, dan Sjahrir mengoordinasi kegiatan-kegiatan bawah tanah.
- Soekarno menerima tawaran Jepang untuk menjadi pemimpin pemerintah Indonesia, tetapi bertanggung jawab kepada militer Jepang.
- 30 Juli, Jepang menduduki Kepulauan Kai dan Aru, setelah sejumlah perlawanan di Kai.
- 31 Juli, Jepang merebut Kepulauan Tanimbar; sejumlah perlawanan oleh KNIL dan detasemen-detasemen Australia di Saumlaki.



### Agustus, September, Oktober

- ◆ 29 Agustus, Jepang mulai memindahkan sejumlah pasukan dari Sumatra dan Jawa ke Kepulauan Solomon.
- ◆ September, orang-orang muslim Indonesia menolak untuk memberi hormat kepada Kaisar Jepang di Tokyo. Peristiwa di Sukamanah, Singaperna Tasikmalaya, Jawa Barat bukti nyata penolakan tersebut. Haji Zaenal Mustafa mengangkat senjata kepada Jepang walaupun kemudian berhasil ditumpas dan beliau dihukum mati di Ancol. Sebagai penghormatan, nama Haji Zaenal Mustafa menjadi nama jalan terpenting di Tasikmalaya.
- ◆ Oktober, kemajuan militer Jepang di Pasifik terhenti; para komandan Jepang disuruh mengembangkan sentimen-sentimen pro-Jepang di wilayah-wilayah pendudukan.
- ◆ 16 Oktober, tentara ke-16 Jepang mengirimkan pasukan-pasukan pengawal ke Lombok, Sumba, dan Timor.
- ◆ Pada mulanya, propaganda Jepang kedengaran seperti perbaikan dibandingkan dengan pemerintahan Belanda. Setelah itu, pasukan-pasukan Jepang mulai mencuri makanan dan menangkap orang untuk dijadikan pekerja paksa, sehingga pandangan bangsa Indonesia terhadap mereka mulai berbalik.

### November, Desember

- ◆ November, pemberontakan di Aceh diredam oleh Jepang.
- ◆ Jenderal Imamura digantikan oleh Jenderal Harada.
- ◆ 7 Desember, Ratu Wilhelmina dari Kerajaan Belanda, di pengasingan berpidato menjanjikan perbaikan hubungan kembali dengan jajahan setelah perang selesai.
- ◆ 27 Desember, Jepang membuka kamp interniran pertama untuk perempuan Belanda di Ambarawa.

## Daftar Pustaka

### Sumber Buku

- P.K., Ojong 2001. *Perang Pasifik*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Poesponegoro, Marwati dan Notosusanto, N. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Penulis. 1978. *Bunga Rampai Sumpah Pemuda 1978*. Jakarta: Depdikbud.
- Tim Penyusun. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. ed. 3. Jakarta: Depdiknas: Balai Pustaka
- Tim Penyusun. 1990. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jakarta: Cipta Adi Pustaka.

### Sumber Internet

- [http://www.geocities.com/dutcheastindies/fall\\_sumatra.html](http://www.geocities.com/dutcheastindies/fall_sumatra.html)
- [http://www.geocities.com/dutcheastindies/lesser\\_sunda.html](http://www.geocities.com/dutcheastindies/lesser_sunda.html)
- <http://www.geocities.com/dutcheastindies/java.html>
- <http://www.geocities.com/dutcheastindies/palembang.html>
- [http://www.geocities.com/dutcheastindies/north\\_sumatra.html](http://www.geocities.com/dutcheastindies/north_sumatra.html)
- <http://www.geocities.com/dutcheastindies/riau.html>
- <http://www.geocities.com/dutcheastindies/sarawak.html>
- <http://www.geocities.com/dutcheastindies/sandakan.html>

<http://www.geocities.com/dutcheastindies/tarakan.html>  
<http://www.geocities.com/dutcheastindies/balikpapan.html>  
<http://www.geocities.com/dutcheastindies/banjarmasin.html>  
<http://www.geocities.com/dutcheastindies/borneo.html>  
<http://www.geocities.com/dutcheastindies/makassar.html>  
<http://www.geocities.com/dutcheastindies/menado.html>  
<http://www.geocities.com/dutcheastindies/kendari.html>  
[http://www.geocities.com/dutcheastindies/timor\\_dutch.html](http://www.geocities.com/dutcheastindies/timor_dutch.html)  
[http://www.geocities.com/dutcheastindies/timor\\_port.html](http://www.geocities.com/dutcheastindies/timor_port.html)  
<http://www.geocities.com/dutcheastindies/ambon.html>  
[http://www.geocities.com/dutcheastindies/banda\\_sea.html](http://www.geocities.com/dutcheastindies/banda_sea.html)  
[http://www.geocities.com/dutcheastindies/new\\_guinea.html](http://www.geocities.com/dutcheastindies/new_guinea.html)  
<http://www.geocities.com/dutcheastindies/manokwari.html>

## Glosarium

- Hak Tawan Karang** : hak raja Bali untuk menguasai, merampas isi muatan kapal yang terdampar di wilayah kerajaannya.
- Pelayaran Hongi** : melakukan pengawasan perdagangan rempah-rempah dan memusnahkan pohon-pohon cengkeh penduduk yang dianggap akan mengganggu kelancaran monopoli Belanda atas Indonesia.
- Pledoi** : pidato pembelaan terhadap terdakwa yang dibacakan oleh advokat (pembela) atau terdakwa sendiri
- Politik Etis** : Politik utang budi bangsa Belanda terhadap Indonesia yang telah memberikan kemakmuran Belanda dengan melakukan perbaikan-perbaikan di bidang irigasi (pengairan), transmigrasi (pindahan), dan edukasi (pendidikan). Namun, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kepentingan pemerintah Belanda sendiri.
- Priyayi** : orang yang termasuk lapisan masyarakat yang kedudukannya dianggap terhormat, misalnya golongan bangsawan
- Rodi** : kerja paksa pada zaman pemerintahan Belanda

- Traktat Sumatra** : memberikan kebebasan kepada Belanda untuk mengadakan perluasan di Sumatra, termasuk di Aceh. Traktat ini dibuat antara pemerintahan Inggris dan Belanda pada 1871
- Tri Koro Dharmo** : Artinya, tiga tujuan mulia, yaitu sakti, budhi, dan bakti. Perkumpulan pemuda pertama di Indonesia yang didirikan pada 7 Maret 1915 dan dipelopori oleh dr. R. Satriman Wiryosandjoyo, Kadarman, dan Sunardi. Tujuan pendiriannya adalah mencapai Jawa Raya dengan jalan memperkokoh rasa persatuan antara pemuda di Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok.
- Volksraad** : Dewan Rakyat yang dibentuk oleh pemerintahan Hindia Belanda

## Indeks

### B

Benteng Duurstede 16

### C

Cornelis de Houtman 4

### D

Dokuritsu Zyunbi Inkai 64

Dr. Wahidin Sudirohusodo 27

### F

Fatahillah 2, 3

### G

GAPI 46, 47, 72

### H

Herman Williem Daendels 13

Hiroshima 62, 64

### I

Indische Partij 31, 32, 33

### K

Kaum Padri 16, 17

Kongres Pemuda 36, 38, 53, 54

Korte Verklaring 25

### L

Landrente 13

### N

Nagasaki 62, 64

natura 13

## P

Pangeran Diponegoro 17, 18, 19  
Pattimura 16  
Pearl Harbor 60, 61  
Pelayaran Hongj 84  
PETA 67, 70  
Pledoi 85  
Politik Etis 84  
Proklamasi 59, 67, 68, 69, 70

## R

Rempah-rempah 1  
Rodi 84

## S

Serikat Islam (SI) 30, 31  
Si Singamangaraja XII 25, 26  
STOVIA 27, 29, 48  
Sultan Ageng Tirtayasa 4, 9  
Sultan Hairun 3  
Sultan Hasanuddin 4  
Sumpah Pemuda 37, 52, 54, 55, 82

## T

Tri Koro Dharmo 34, 35, 52, 84

## U

Untung Surapati 9, 10, 11

## V

Volksraad 40, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 72, 73, 85

## W

Wage Rudolf Supratman 37